

KK  
KKB  
CP. 12/12  
AM

K

Ilmu Sosial

**LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING  
TAHUN ANGGARAN 2011**



**KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN DAN VANDALISME  
MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR**

Peneliti :

Dr. Siti Aminah, M.A.  
Drs. Ramli AT., M.Si.

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing  
Nomor : 004/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2011

## HALAMAN PENGESAHAN

**1. Judul : KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN DAN VANDALISME MAHASISWA DI MAKASSAR**

**2. Ketua Peneliti**

a. Nama Lengkap (gelar)	Dr. Siti Aminah, MA.
b. Bidang Keahlian	Perilaku Politik
c. Jenis Kelamin	Perempuan
d. NIP	196502241989032002
e. Pangkat / Golongan	Pembina/IV a
f. Jabatan	Lektor Kepala
g. Unit Kerja	FISIP Unair
h. Alamat Surat	FISIP UNAIR Dharmawangsa Dalam, Surabaya

**Tim Peneliti**

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu Jam / Minggu
1.	Drs. Ramli AT, M.Si	Sosiologi Politik	Universitas Hasanuddin	15

**3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian:**

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : Satu tahun  
 b. Biaya yang diusulkan : Rp 49.940.000,-  
 c. Biaya yang disetujui : Rp 49.940.000,-

Surabaya, 9 November 2011

Mengetahui,  
Dekan Fisip Unair

Ketua Peneliti,

Drs. Ignatius Basis Susilo, M.A

Dr. Siti Aminah, MA

NIP.195408081981031007

NIP.196502241989032002

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga



Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si

NIP. 195908051987011001

## RINGKASAN

### A. Judul Penelitian dan Nama Penelitian

[Siti Aminah, Ramli AT, 2011, 75 halaman]

### B. Isi Ringkasan:

Dalam analisis ini fenomena kekerasan mahasiswa bukan hendak dipahami sebagai kekerasan seperti yang tampak sebagai realitas seperti yang ditayangkan oleh media, tetapi hendak memahami, menjelaskan dan merumuskan rekomendasi untuk menghentikan praktik kekerasan mahasiswa itu. Kekerasan demi kekerasan terjadi, mulai dari perkelahian antarmahasiswa, tawuran antar fakultas sampai pada kekerasan melawan tindakan represif aparat keamanan. Kekerasan itu terjadi bukan tanpa sebab, ada faktor sosial-kultural yang berperan menjadi pemicunya, seperti ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan yang dibuat oleh elite kampus, kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, pengembangan jaringan kuasa dengan elite di tingkat lokal-nasional, perebutan kekuasaan untuk menempati posisi dominan di kampus, dsb.

Fenomena-fenomena kekerasan yang dilakukan mahasiswa seakan-akan sudah menyatu dengan karakter mahasiswa. Mahasiswa adaah kekerasan, dan kekerasan adalah bagian dari kehidupan mereka. Kekerasan juga dapat ditarik dari aspek budaya. Dalam logika seperti itu, kekerasan adalah produk kultur dan karenanya tidak menutup kemungkinan budaya itu direproduksi.

Persoalannya adalah mengapa mahasiswa di Makassar cenderung melakukan kekerasan dan perusakan dalam aksi-aksi unjuk rasanya? Faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya? Sebagian kekerasan mahasiswa saat berunjuk rasa akibat ketidakadilan pemerintah. Tetapi tetap saja gerakan mahasiswa masih berada pada wilayah yang abstrak karena tidak ada rumusan jelas atas isu yang diperjuangkan.

Penelitian ini berupaya melakukan konstruksi sosial tentang fenomena kekerasan mahasiswa yang ajek terjadi di Makassar. Fenomena itu merupakan wujud dari pagelaran yang dipertontonkan lewat adu kekuatan fisik dan nonfisik. Adu kekuatan itu merepresentasikan nilai-nilai kekerasan dan ketidakberadaban mahasiswa baik di dalam kampus dan di luar kampus, bahkan ada sebagian dari fenomena adu kekuatan itu melibatkan aparat keamanan.

Asumsinya, unjuk kekuatan yang mengedepankan nilai-nilai kekerasan disebabkan oleh kekuatan solidaritas internal dalam fakultas maupun mahasiswa sebagai kekuatan kolektif yang sering terlihat dari aksi-aksinya turun ke jalan. Format unjuk kekuatan dengan cara-cara kekerasan bukan sepenuhnya untuk memperjuangkan perubahan maupun untuk mengoreksi tatanan sosial politik yang ada. Asumsi lain penelitian ini adalah bahwa kekerasan yang dijalankan mahasiswa dapat dipahami sebagai strategi untuk memenangi pertarungan antarmahasiswa/kelompok mahasiswa berdasar garis etnik maupun antarideologi. Tak dapat diingkari, ada peran dari konteks dan *setting* lokal kota Makassar secara umum terhadap terjadinya aksi-aksi kekerasan mahasiswa.

Ada relasi sosial kultural antara kekerasan mahasiswa dengan norma-norma dan identitas suatu etnis yang ada di Makassar. Kontestasi kekerasan mahasiswa di kampus bisa terjadi karena ada nilai arogansi yang melekat dan diwariskan dari

angkatan ke angkatan. Kekerasan itu tidak ada corak perjuangan akan kepentingan besar atau urgensi untuk mengakomodasi kritik dan kepentingan masyarakat luas. Ini artinya, motivasi mahasiswa melakukan gerakan dengan mengambil bentuk kekerasan sangat berbeda dengan mahasiswa masa rejim Orde Lama maupun Orde Baru. Karenanya, kekerasan mahasiswa tidak dapat dihentikan dengan regulasi melalui kebijakan skorsing, drop out dll (sebagai bentuk sanksi) saja, tetapi diperlukan kebijakan lebih lengkap melalui kebijakan yang memberikan reward.

Kekerasan mahasiswa di Makassar berupa tawuran sesama mahasiswa yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka. Dalam tawuran tersebut, para mahasiswa melakukan hal yang menjurus ke tindakan yang anarkhis dan menggunakan senjata tajam seperti badik, parang, busur panah dan menggunakan senjata api seperti pistol rakitan dan Papporo (senjata khas Palopo) sehingga menewaskan seorang mahasiswa, tiga orang lainnya luka parah.

Selama ini mahasiswa masuk dalam tatanan kerangkeng besi (kurikulum pendidikan) dan situasi kekakuan serta keterasingan hubungannya dengan dosen. Yang terjadi adalah mahasiswa menjadi objek akademis dari dosen. Dosen memberi tugas sebanyak-banyaknya tanpa memberikan umpan balik atau mengoreksi dan mengembalikan pekerjaan itu kepada mahasiswa. Mahasiswa harus dibangun karakternya secara akademis, dan moralistik. Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas atau memenuhi tugas yang diwajibkan oleh dosen tidak serta merta diberikan sanksi. Mahasiswa perlu ditelusur alasannya atas tugas yang tidak dikerjakannya itu. Ada proses dialog dan mahasiswa diberi kebijakan kompensasi yang bisa menggiatkan daya nalar mahasiswa dengan cara yang lain. Contoh: dengan memberi tugas lain atau membuat paper, mereview dll. Dengan cara itu pelaksanaan Kurikulum Berbasis Karakter (KBKt) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBKp) dapat dijalankan.

Di samping itu, mahasiswa juga selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan akedemis non kuliah, seperti diskusi, workshop, seminart dll. Ini sebagai upaya membangun atmosfir akademik perlu dibangun, dikembangkan sehingga lingkungan kampus tidak menjadi lingkungan akademik yang membosankan, terstruktur, dan kaku. Kecenderungan yang ada selama ini, kampus tidak ada atmosfir akademik. Mahasiswa berorientasi praktis pada kelulusan sebagai sarjana, cepat lulus adalah semakin baik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membaca kecenderungan seperti ini. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk merevitalisasi kekuatan moral mahasiswa yang sudah digerogeti oleh kepentingan sesaat dan politis. Meski banyak pihak meragukan karakter, mental, dan moral dapat diajarkan dan diatasi dalam mata kuliah. Kalaupun ada KBKt dan KBKp, mereka hendaknya dimulai dan diikuti dengan pendekatan yang manusiawi dan beradab.

Masyarakat hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang diusung oleh mahasiswa. Masyarakat hendaknya lebih dewasa dalam bersikap dan bertindak. Karena aksi-aksi terbuka yang berlangsung di area publik selama ini mudah diprovokasi oleh masyarakat untuk tujuan lain. Masyarakat juga sering menjadi pembonceng aksi-aksi unjuk rasa bahkan berbaur sehingga aksi kekerasan pun tumpah ruah di jalan. Aksi-aksi nyata yang dilakukan mahasiswa dengan merusakkan fasilitas publik termasuk tindakan yang merugikan masyarakat seperti pembakaran ban bekas dll seyogianya tidak didekati dengan pendekatan keamanan, dengan

melibatkan aparat polisi untuk mengatasinya. Kecenderungan ini terbukti semakin memperkeras terjadinya aksi kekerasan sebagai bentuk perlawanan mahasiswa. Tindakan tersebut tidak menjamin proses kekerasan pada gelombang berikutnya dapat diselesaikan tuntas. Untuk itu, intervensi dalam membongkar akar-akar kekerasan pada dimensi kedua dan ketiga sangat diperlukan dan dilakukan secara bersamaan.

Pengelolaan semua potensi mahasiswa merupakan kebijakan alternatif yang bisa diterapkan untuk memutus jaring kekerasan mahasiswa. Pengelolaan potensi itu bisa ditempuh dengan perbaikan metode belajar mengajar yang bersifat dialogis, tidak mengutamakan pendekatan yang bersifat teknis dan kaku. Untuk mencapai hal ini diperlukan perubahan dalam kebijakan perguruan tinggi. Seluruh civitas akademika tidak melakukan interpretasi secara tunggal kekerasan itu, tetapi menafsirkannya secara multiaspek. Karena kekerasan adalah bukan kekerasan itu sendiri. Kekerasan lebih merupakan manifestasi dari kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas jati diri sebagai mahasiswa yang kritis.

Suara dan kepentingan mahasiswa bukan suara dan kepentingan mahasiswa sendiri, melainkan suara masyarakat juga. Ini suatu indikasi bahwa mahasiswa berjuang untuk kepentingan masyarakat juga. Habitus yang mendukung dan mengkonstruksi mahasiswa melakukan kekerasan. Mahasiswa cenderung melakukan perlawanan dan berorientasi pada perubahan-perubahan struktural (demonstrasi yang mengusung isu-isu nasional, seperti UU BHP, UU bidang politik, dll).

#### C. Identitas Kelembagaan:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

No.Kontrak: 0145.0/0234-04.0/2007

Tanggal: 31 Desember 2006

## ABSTRAK

Studi ini bermaksud mengeksplorasi, memahami, serta memberikan rekomendasi tentang fenomena unjuk kekuatan yang mengedepankan nilai-nilai kekerasan. Kekerasan mahasiswa di Makassar muncul akibat dari kekuatan solidaritas internal dalam fakultas maupun mahasiswa sebagai kekuatan kolektif yang sering terlihat dari aksi-aksinya turun ke jalan. Mahasiswa sebagai mesin kekerasan bukan sesuatu yang berada di luar diri mahasiswa, tetapi mesin itu diciptakan dan digunakan oleh mahasiswa untuk membunyikan berbagai realitas (ketimpangan, kesenjangan, ketidak-adilan). Berbagai realitas sosial, budaya, ekonomi maupun politik yang tidak sesuai dengan pemahaman atau persepsi mahasiswa diartikulasikan dengan kekerasan dan vandalisme. Melakukan kekerasan dan perusakan menjadi pilihan rasional sebagai cara untuk memecahkan setiap persoalan yang ada. Perbedaan habitus terkait dengan posisi mahasiswa dalam kehidupan sosial dan konteksnya, tidak setiap mahasiswa memiliki kebiasaan yang sama. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan/daya nalar yang tinggi diasumsikan memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang berbeda dengan mahasiswa yang lebih mengutamakan emosi dan egonya dalam memahami dan menafsirkan realitas politik yang ada di sekitarnya.

Kata kunci: kekerasan, vandalisme, mahasiswa, pilihan rasional.

## KATA PENGANTAR

Kegiatan penelitian ini mengeksplorasi tentang kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar merupakan salah satu representasi dari wajah kekerasan yang akhir-akhir ini meresahkan berbagai pihak. Aksi-aksi tawuran terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun bahkan meningkat sehingga menggegerkan komunitas kampus, masyarakat akademik, masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Direktorat Pendidikan Tinggi). Aksi-aksi sosial mahasiswa yang brutal itu timbul bukan tanpa alasan. Banyak sekali peristiwa kekerasan yang terjadi di kampus-kampus kota Makassar telah mencoreng dunia pendidikan tinggi dan eksistensi mahasiswa. bentuk-bentuk ketimpangan gender yang dipandang bukan sebagai persoalan mendesak bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu kegiatan ini membutuhkan waktu yang lama, baik dalam kegiatan mengumpulkan data maupun dalam menyusun laporan, karena kendala-kendala teknis dan nonteknis yang ditemui selama proses penelitian. Riset ini pendanaannya melalui proyek DIPA Universitas Airlangga, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Penelitian Multitahun Tahun Anggaran 2011 No. 844/H3/KR/2011, Tanggal 20 April 2011, untuk itu kami sampaikan terimakasih. Kepada para informan dan tenaga lapangan di Makassar yang telah bersusah payah untuk mendapatkan data, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya, semua isi dalam draft laporan ini masih perlu didiskusikan kembali dalam tim riset untuk menjadi laporan yang sebagaimana mestinya.

Tim Peneliti

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latarbelakang Masalah

Fenomena umum aksi-aksi kekerasan mahasiswa pada saat ini mencerminkan tindakan yang bersifat destruktif dan sekaligus anarkhis. Kecenderungan itu terlihat dari beberapa fenomena kekerasan social seperti aksi tawuran antarmahasiswa baik dalam arena kampus maupun di luar kampus, dan kekerasan antara mahasiswa dengan aparat keamanan negara. Pertanda apa fenomena kekerasan social demikian itu?

Kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa di kota Makassar merupakan salah satu representasi dari wajah kekerasan yang akhir-akhir ini meresahkan berbagai pihak. Aksi-aksi tawuran terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun bahkan meningkat sehingga menggegerkan komunitas kampus, masyarakat akademik, masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Direktorat Pendidikan Tinggi). Aksi-aksi sosial mahasiswa yang brutal itu timbul bukan tanpa alasan. Banyak sekali peristiwa kekerasan yang terjadi di kampus-kampus kota Makassar telah mencoreng dunia pendidikan tinggi dan eksistensi mahasiswa. Persoalannya adalah mengapa mahasiswa melakukan aksi-aksi kekerasan dan perusakan? Bagaimana menyelesaikan aksi-aksi kekerasan sosial mahasiswa secara utuh?

Dalam analisis ini fenomena kekerasan mahasiswa bukan hendak dipahami sebagai kekerasan seperti yang tampak sebagai realitas seperti yang ditayangkan oleh media, tetapi hendak memahami, menjelaskan dan merumuskan rekomendasi untuk menghentikan praktik kekerasan mahasiswa itu. Kekerasan demi kekerasan terjadi, mulai dari perkelahian antarmahasiswa, tawuran antar fakultas sampai pada kekerasan melawan tindakan represif aparat keamanan. Kekerasan itu terjadi bukan tanpa sebab, ada factor social-kultural yang berperan menjadi pemicunya, seperti



*ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan yang dibuat oleh elite kampus, kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, pengembangan jaringan kuasa dengan elite di tingkat lokal-nasional, perebutan kekuasaan untuk menempati posisi dominan di kampus, dsb.*

Fenomena-fenomena kekerasan yang dilakukan mahasiswa seakan-akan sudah menyatu dengan karakter mahasiswa. Mahasiswa adaah kekerasan, dan kekerasan adalah bagian dari kehidupan mereka. Kekerasan juga dapat ditarik dari aspek budaya. Dalam logika seperti itu, kekerasan adalah produk kultur dan karenanya tidak menutup kemungkinan budaya itu direproduksi.

Persoalannya adalah mengapa mahasiswa di Makassar cenderung melakukan kekerasan dan perusakan dalam aksi-aksi unjuk rasanya? Faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya? Sebagian kekerasan mahasiswa saat berunjuk rasa akibat ketidakadilan pemerintah. Tetapi tetap saja gerakan mahasiswa masih berada pada wilayah yang abstrak karena tidak ada rumusan jelas atas isu yang diperjuangkan.

Penelitian ini berupaya melakukan konstruksi sosial tentang fenomena kekerasan mahasiswa yang ajek terjadi di Makassar. Fenomena itu merupakan wujud dari pagelaran yang dipertontonkan lewat adu kekuatan fisik dan nonfisik. Adu kekuatan iu merepresentasikan nilai-nilai kekerasan dan ketidakberadaban mahasiswa baik di dalam kampus dan di luar kampus, bahkan ada sebagian dari fenomena adu kekuatan itu melibatkan aparat keamanan.

Asumsinya, unjuk kekuatan yang mengedepankan nilai-nilai kekerasan disebabkan oleh kekuatan solidaritas internal dalam fakultas maupun mahasiswa sebagai kekuatan kolektif yang sering terlihat dari aksi-aksinya turun ke jalan. Format unjuk kekuatan dengan cara-cara kekerasan bukan sepenuhnya untuk memperjuangkan perubahan maupun untuk mengoreksi tatanan sosial politik yang ada. Asumsi lain penelitian ini adalah bahwa kekerasan yang dijalankan mahasiswa dapat dipahami sebagai strategi untuk memenangi pertarungan antarmahasiswa/kelompok mahasiswa berdasar garis etnik maupun antarideologi. Tak dapat diingkari, ada peran

dari konteks dan *setting* lokal kota Makassar secara umum terhadap terjadinya aksi-aksi kekerasan mahasiswa.

Ada relasi sosial kultural antara kekerasan mahasiswa dengan norma-norma dan identitas suatu etnis yang ada di Makassar. Kontestasi kekerasan mahasiswa di kampus bisa terjadi karena ada nilai arogansi yang melekat dan diwariskan dari angkatan ke angkatan. Kekerasan itu tidak ada corak perjuangan akan kepentingan besar atau urgensi untuk mengakomodasi kritik dan kepentingan masyarakat luas. Ini artinya, motivasi mahasiswa melakukan gerakan dengan mengambil bentuk kekerasan sangat berbeda dengan mahasiswa masa rejim Orde Lama maupun Orde Baru. Karenanya, kekerasan mahasiswa tidak dapat dihentikan dengan regulasi melalui kebijakan skorsing, drop out dll (sebagai bentuk sanksi) saja, tetapi diperlukan kebijakan lebih lengkap melalui kebijakan yang memberikan *reward*.

Kekerasan mahasiswa di Makassar berupa tawuran sesama mahasiswa yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terluka. Dalam tawuran tersebut, para mahasiswa melakukan hal yang menjurus ke tindakan yang anarkhis dan menggunakan senjata tajam seperti badik, parang, busur panah dan menggunakan senjata api seperti pistol rakitan dan Papporo (senjata khas Palopo) sehingga menewaskan seorang mahasiswa, tiga orang lainnya luka parah.

Kekerasan mahasiswa pada saat ini mempunyai realitas yang berbeda dengan kondisi masa-masa sebelumnya. Kekerasan yang diawali dengan unjuk rasa bisa jadi dipahami sebagai sebuah pilihan rasional dari sebuah situasi yang mendesak, tetapi bias jadi tidak demikian. Pengulangan cara-cara kekerasan yang dilakukan mahasiswa dapat ditafsirkan sebagai indikasi dari lemahnya atau berkurangnya validasi pendidikan moral dan ajaran etika kebersamaan dalam lingkungan akademik. Sistem pendidikan kampus perlu dikaji dalam konteks ini. Sistem pendidikan tinggi di kampus bukan semata-mata mengajarkan pengetahuan normative, tetapi juga praksis akademis. Kurikulum tidak seharusnya membelenggu sikap, moral, dan

*mental mahasiswa. Justru mahasiswa bagian dari masyarakat, membutuhkan kurikulum itu untuk acuan perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kehidupan kampus dan masyarakat menjadi harmonis dan teratur.*

Dunia kampus sebagai institusi pendidikan bersifat plural. Pluralitas mahasiswa melebur dalam satu identitas masyarakat akademik. Identitas ini mengalami cedera social politik akibat ketidakmampuan mahasiswa memahami kurikulum dan mempraktikkan ilmunya. Keberingasan menjadi ciri yang menonjol di kampus dan melekat dalam diri mahasiswa. Meski mahasiswa Makassar tidak sepenuhnya menerima pencitraan buruk itu, tetapi wacana dominan tindak keberingasan/kekerasan yang telah dipertontonkan mahasiswa kepada masyarakat luas didalam dan di luar Makassar telah mengantarkan pentingnya memahami dan mencari tahu aspek sosial yang melatari dilakukannya tindak kekerasan/keberingasan itu dengan menggunakan perspektif structural.

Karakteristik mahasiswa yang beragam di masyarakat memberikan dinamika tersendiri bagi kampus dan juga mahasiswa sebagai individu dalam mengaktualisasikan jati dirinya. Proses pengaktualisasian jati diri inilah mahasiswa mudah terkooperasi pada segmen primordialistik dan fanatisme sempit yang dianggap layak dipertahankan bahkan ditularkan pada generasi-generasi selanjutnya. Doktrinasi nilai tertentu itu berlanjut menjadi sebuah tradisi yang mengarahkan mahasiswa menjadi energi baru khususnya pada penerimaan mahasiswa baru, walaupun harus tetap diakui bahwa progresivitas pencerahan keilmuan khususnya pada lembaga kemahasiswaan tetap berjalan. Secara umum, peranan lembaga kemahasiswaan berangsur-angsur dilumpuhkan oleh birokrasi kampus, sehingga proses pendewasaan dan pencerahan ditempuh dengan kegiatan-kegiatan di luar ruang perkuliahan. Ini merupakan problematika yang dirasakan mahasiswa saat ini. Proses belajar di ruang kuliah dipandang tidak memadai untuk menjalankan peran sebagai mahasiswa. Kecenderungan itu akibat kebijakan nasional yang telah memunculkan dualisme pembagian organisasi mahasiswa yang berlaku semenjak masa pemerintah Orde Baru. Saat itu pemerintah berkepentingan untuk membatasi gerakan mahasiswa yang dianggap menjadi antek atau kaki

tangan partai politik. Mahasiswa ditempatkan dalam ruang kampus diasumsikan dapat steril dari politik, dan kebijakan itu berlaku sampai sekarang dengan beberapa modifikasi kebijakan yang mengatur mahasiswa. Pada masa Orde Baru ada kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978. Konsep tersebut sebagai upaya dalam mengarahkan mahasiswa untuk konsentrasi pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik praktis. Diasumsikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis dapat membahayakan posisi pemerintah saat itu.

Perlu kebijakan yang menghubungkan tatanan makro dan mikro, tatanan di tingkat nasional dan lokal perlu dipertemukan, sehingga mahasiswa dan seluruh civitas akademika dapat mengawal kegiatan pendidikan dan belajar mengajar. Kampus tidak menjadi ajang politisasi kepentingan kelompok tertentu. Kampus menjadi arena belajar dan pendidikan. Hal ini diatur melalui Keputusan Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KeP/ 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.

Dalam keputusan itu, organisasi dalam ruang lingkup dunia kampus adalah organisasi mahasiswa yang terbagi menjadi dua, yakni organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus. Organisasi intra kampus dimaknai sebagai organisasi yang ada dalam pengawasan kampus dimana kebijakannya selalu dikonfirmasi dengan kebijakan kampus, ciri yang lebih khusus bahwa organisasi intra kampus ini mendapat sokongan dana dari kampus karena keberadaannya memang sebagai wadah penyalur dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Perwujudan dari organisasi ini bisa berupa UKM (unit kegiatan mahasiswa), yaitu musik, teater, keagamaan dan kerohanian, pecinta alam, lembaga pers mahasiswa, pramuka, resimen mahasiswa, bela diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu resolusi atas kekerasan mahasiswa memerlukan regulasi kebijakan pendidikan yang komprehensif. Regulasi itu mencakup rancangan metode aksi dan sanksi terhadap mahasiswa.

## **2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latarbelakang itu, sangat mendesak dan perlu melakukan refleksi teoretis dan faktual guna memberikan rekomendasi tentang pentingnya memahami, menjelaskan dan merumuskan jalan keluar terbaik (*best practices*) bagi praktik kekerasan yang terjadi selama ini.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor social kultural apa yang melatari budaya kekerasan mahasiswa di Makassar?
2. Bagaimana kekerasan itu dihasilkan dan direproduksi dari generasi ke generasi dan dari masa ke masa?
3. Langkah-langkah praktis dan strategis apa yang dapat diambil, diterapkan untuk mengurangi praktik kekerasan dari komunitas mahasiswa di Makassar?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengantar**

Berpijak pada realitas transisi reformasi yang terjadi kini, mahasiswa sebagai aktor intelektual memiliki peran penting dan strategis bagi perubahan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Namun sebagai salah satu pelaku perubahan, mahasiswa tidak selalu berjuang dan bergerak pada tatanan nilai-nilai yang beradab. Mahasiswa menggunakan cara-cara kekerasan dalam aksi unjuk rasa (demonstrasi) atau tawuran antarmahasiswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maupun untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi, baik itu dengan civitas akademika, sesama mahasiswa, pemerintah local, maupun aparat penegak hukum.

Kekerasan seakan-akan menjadi pilihan rasional dan menjadi citra baru mahasiswa dalam menyelesaikan masalah dan dalam mengungkapkan masalahnya. Persoalan bagaimana kekerasan mahasiswa yang kini menjadi fenomena social politik di Makassar dijelaskan secara teoretik, khususnya dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada persoalan relasi antara agen dan struktur, nilai-nilai, dan aspek social kultural dari mobilisasi kelompok mahasiswa.

Pemahaman tentang kekerasan penting untuk menunjukkan bahwa perilaku kekerasan dalam banyak kasus merupakan bagian kecil dari penyebab suatu konflik, dan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa perlunya mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kekerasan dan memperoleh keuntungan darinya sehingga disebut sebagai wiraswatawan konflik yang kepentingannya terpenuhi melalui kekerasan yang berlangsung terus menerus (Fisher, Abdi, et.al, 2000). Sejak reformasi, kondisi sosial politik di Indonesia ditandai dengan dua gejala yang amat mencolok yaitu konflik horizontal antara elit dan mahasiswa.

## **2.2. Konstruksi Praktik Kekerasan Mahasiswa**

Mahasiswa adalah pembelajar, juga bias disebut sebagai actor intelektual, yang mengemban fungsi sebagai agen perubahan dan kekuatan moral di masyarakat, bangsa, dan Negara. Tetapi perkembangan bangsa ini telah merubah eksistensi mahasiswa, bukan sebagai kekuatan control yang ampuh terhadap terjadinya kemencengan-kemecengan kebijakan yang dibuat oleh actor-aktor di kampus, tingkat pemerintahan local dan nasional. Mahasiswa sebagai salah satu lakon reformasi Negara, saat ini juga menjadi kekuatan kolektif yang berorientasi praktis, jangka pendek dan sempit serta parsial. Karena itu, mahasiswa sering bergolak dan bertindak untuk meraih tujuan praktis itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Fisher (2000) bahwa perbedaan atau ketidaksesuaian pendapat antara dua orang/kelompok atau lebih tentang isyu tertentu bias memicu perbedaan pendapat, tawuran dan kerusuhan social.

Mahasiswa dalam kondisi saat ini tidak semata-mata membela kepentingan masyarakat tetapi membela kepentingan dirinya, kelompoknya. Padahal dalam kehidupan nyata, masyarakat masih membutuhkan mahasiswa sebagai kekuatan moral untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya daripada kemampuan emosinya. Dalam konteks ini mahasiswa hanya diperbolehkan bergerak dalam tataran kegiatan keilmuan-ilmiah, dan bukan dalam tataran praksis gerakan (politik/sosial).

Bahkan SK No.155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Ini merupakan bunyi dari pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan No. 155 tahun 1998. Ada kebijakan pendukung lain, yaitu Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor: 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus, intimidasi dan ancaman pengurangan nilai terhadap mahasiswa yang kritis terhadap kehidupan kampus, pelarangan demonstrasi sampai pada represifitas secara langsung dengan kekerasan. SK tersebut memberikan keleluasaan dan jaminan penuh kepada mahasiswa untuk lulus tepat waktu. SK itu berimplikasi pada

*pengetatan kuliah dan sistem presensi, pemberlakuan kode etik, jam malam, larangan bagi organisasi ekstra (ormas) dan partai politik membuka sekretariat atau perwakilan di kampus. Pasal 13 menetapkan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.*

Peraturan-peraturan itu bukan mengurangi daya kritisisme mahasiswa justru meningkatkan daya kritisnya. Mahasiswa ingin memperoleh pengalaman praktis, selain pengalaman dalam aspek teoretik—pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah menguji kemampuan kritis dan kepekaannya dalam menilai realitas sosial yang ada. Kebutuhan praksis mahasiswa ini bisa diwujudkan melalui organisasi intra dan ekstra kampus. Namun kecenderungannya, organisasi ekstra kampus lebih diminati.

Salah satu pemikiran yang mendasari adalah organisasi dapat digunakan sebagai arena untuk menyalurkan aspirasinya politiknya, selain itu juga untuk mencari pengalaman politik praktis, sehingga mereka menjadi kader organisasi ekstra tertentu. Hal ini dapat melengkapi diri mahasiswa antara yang akademis dan praktis. Kampus secara ideal adalah arena pendidikan dan tidak dibenarkan untuk dijadikan arena politik praktis partai politik apapun.

Yang menarik dari keterlibatan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus akhirnya menjadi pilihan mahasiswa untuk menjadikannya sebagai kekuatan yang acap menjelma menjadi arena unjuk kekerasan mahasiswa. Bahkan kekerasan menjadi tradisi rutin. Ini terlihat dari data kekerasan/tawuran mahasiswa di Universitas Hasanudin. Pada 16 Desember tahun 2004 (ada tawuran yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dan Sospol). Kemudian pada 31 Agustus sampai 1 September 2005 terjadi perkelahian antara mahasiswa Fak. Teknik dan Fisip) yang mengakibatkan beberapa dosen dan mahasiswa cedera. Peristiwa tawuran ini terjadi kembali pada 5 Desember 2007. Peristiwa-peristiwa buruk ini menjadi indikasi kuat dari lemahnya nalar mahasiswa dalam menyikapi setiap pertentangan/konflik yang ada.



### **2.2.1. Mahasiswa dan Identitas Kolektif**

Dalam kajian gerakan social lazim pendekatan fenomenologi digunakan untuk menjelaskan tentang konstruksi identitas social kelompok. Dalam kajian ini, digunakan pendekatan identitas mahasiswa yang menekankan pada identitas kolektif dari sebuah perjuangan gerakan mahasiswa dalam upaya memperoleh suatu nilai yang diinginkan (Tourine, 1998). Dengan mempelajari pengalaman praktis partisipasi dalam tindakan kolektif, mahasiswa dapat membangun/menciptakan identitasnya. Teori identitas kolektif menekankan perspektif social kultural dalam memahami realitas dan mencari tahu tentang tindakan kolektif itu berkaitan dengan dunia yang multikultural.

Identitas kolektif dapat berupa bahasa, agama, wilayah, organisasi social, budaya, dan ras (Fisher, Abdi, et.al., 2000). Penelitian ini juga menggunakan paradigma kelembagaan yang menekankan pada aspek perilaku individu, khususnya peran pemimpin dalam organisasi, dan proses integrasi dan pelebagaan tindakan kolektif dalam tatanan politik. Persoalan utama untuk memahami gerakan mahasiswa menurut paradigma ini adalah mempertanyakan tentang bagaimana dan mengapa gerakan itu terjadi? Apa saja dimensi organisasi dari tindakan kolektif itu? Apakah motivasi, perasaan, dan ide-ide dari actor gerakan?

Paradigma tersebut relevan digunakan untuk menjelaskan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar karena mengaitkan aspek mobilisasi sumberdaya, mobilisasi politik, dan konsep peluang politik yang selalu dipertimbangkan untuk memperbaiki tindakan kolektif tersebut. (McCarthy and McAdam dalam McAdam et.al., 1996).

### **2.2.2. Mahasiswa dan Perilaku Kekerasan Kolektif**

Skokpol, Gurr dan Davies menekankan faktor-faktor eksternal sebagai penyebab kekerasan kolektif, bukan semata-mata faktor minat, strategi saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Giddens (1984) bahwa tindakan agen atau actor (dalam bentuk kekerasan politik kolektif) dianggap tidak lebih dari dari

artefak atau produk struktur yang ada. Dalam kerangka pemikiran Giddens kekerasan mahasiswa muncul akibat struktur sosial digunakan oleh agen-agen aktif (mahasiswa). Pada saat menggunakan perangkat-perangkat struktur, agen aktif itu mengubah atau mereproduksi struktur itu, sehingga terjadilah proses strukturasi (dualitas struktur), artinya agen yang menggunakan struktur, dan cara-cara yang membuat semuanya saling memberi dampak satu sama lain dalam hal memproduksi pola-pola yang beraneka ragam dari organisasi kehidupan manusia.

Struktur dapat dikonsepsikan sebagai aturan dan aset (*resources*) yang dapat digunakan oleh aktor dalam konteks interaksi. Konteks Interaksi ini membesar melalui ruang dan waktu. Aturan adalah prosedur yang dapat digeneralisasi yang dipahami dan digunakan oleh aktor dalam berbagai situasi. Giddens menyatakan bahwa sebuah aturan adalah metodologi atau tehnik yang dimengerti oleh aktor. Aturan sering kali secara implisit menyediakan formula yang relevan untuk sebuah tindakan. Dari sisi pandang sosiologi, aturan yang paling penting adalah aturan-aturan yang digunakan oleh para agen untuk memproduksi ulang relasi sosial melalui waktu tertentu dan ruang. Karakteristik dari aturan ini adalah : (i) Sering dipakai dalam percakapan, ritual interaksi, rutinitas harian individu; (ii) Diserap tanpa disadari dan dimengerti sebagai *stock of knowledge* dari aktor yang berkepentingan.; (iii) tidak bersifat formal, tidak tertulis dan tidak terucapkan secara lisan; (iv) Memiliki kekuatan sanksi yang lemah yaitu melalui tehnik interpersonal.

Dalam penelitian ini persoalannya adalah bagaimana tindakan mahasiswa merupakan suatu proses sosialisasi dan produk struktur yang berlaku, dan bagaimana tindakan tersebut merupakan produk pilihan rasional yang sengaja diambil oleh mahasiswa sebagai aktor otonom. Analisis tentang kekerasan dan vandalisme mahasiswa juga merupakan persoalan yang merefleksikan dualitas agen dan struktur. Sehingga analisis tak terlepas dari upaya untuk menjelaskan suatu efek peristiwa sosial politik tertentu sebagai konsekuensi (implikasi dan dampak) dari tindakan dan tujuan aktor yang terlibat dan atau produk dari struktur serta relasi sosial dari aktor tersebut.

*Struktur sosial diartikan sebagai aturan dan aset yang dapat diubah sebagaimana aktor menggunakan hal tersebut dalam aturan yang konkrit. Struktur sosial dapat dirubah dan fleksibel sifatnya. Struktur sosial adalah bagian dari aktor pada situasi sebenarnya dan digunakan oleh para aktor untuk menciptakan pola hubungan sosial melalui waktu dan ruang (Giddens, 1984).*

Unsur penting dari stuktur, aset adalah fasilitas yang aktor gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Walaupun ada formula dan strategi yang menuntun sebuah tindakan, namun harus ada pula ketrampilan untuk melaksanakan tugas. Sebuah ketrampilan membutuhkan aset atau materi berupa perlengkapan dan kemampuan organisasi untuk bertindak dalam sebuah situasi. Giddens (1984) menggambarkan aset sebagai suatu hal yang menggerakkan kekuatan. Mobilitas dari aset-asetlah yang memberikan kekuatan kepada aktor untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena itu, kekuatan menjadi satu dengan keberadaan struktur.

Ketika berinteraksi seorang aktor menggunakan aset-aset dan saat dia menggunakan aset, aktor memobilisasi kekuatan untuk membentuk tindakan terhadap orang lain. Aturan dan aset sebagai *transformational* dan *mediating*. Maksudnya adalah aturan dan aset dapat dirubah menjadi berbagai macam pola dan bentuk. Aset dapat dimobilisasi dalam banyak cara dan memperoleh hasil melalui praktek dari berbagai bentuk dan derajat kekuasaan yang berbeda-beda. Aturan dapat menghasilkan berbagai perbedaan kombinasi metodologi dan formula untuk memberi petunjuk bagaimana orang harus berkomunikasi, berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan satu sama lain. Aturan dan aset yang memiliki fungsi demikian dapat dilihat sebagai media yang menyatukan hubungan sosial. Aset inilah yang digunakan aktor untuk menjaga atau mengubah hubungan melalui waktu dan ruang. Giddens mengartikan aset sebagai komponen dari dominasi karena didalamnya melibatkan mobilisasi dari materi dan fasilitas organisasi untuk melakukan hal-hal tertentu. Beberapa aturan diubah menjadi instrumen dari legitimasi karena aturan ini sepertinya membuat hal-hal menjadi benar dan tepat. Aturan lain kemudian digunakan untuk menciptakan signifikansi atau sistem

*simbol yang berarti, karena aturan lain tersebut memberitahukan cara untuk melihat dan menginterpretasi kejadian.*

### **2.3. Kekerasan Mahasiswa sebagai Gerakan Sosial**

Sebagaimana disampaikan di depan bahwa kekerasan mahasiswa tidak murni mencerminkan gerakan sosial karena mahasiswa tidak bergerak secara individual tetapi terorganisasi. Tilly (2004) berpendapat bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir, berkelanjutan, menolak kesadaran diri serta didalamnya terdapat kesamaan identitas pelakunya. Gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarahnya, artinya setiap gerakan sosial yang muncul selalu terkait dengan sejarah dan hal ini yang membedakan dengan tegas gerakan sosial dengan sejarah bentuk-bentuk aktivitas politik lainnya seperti kampanye pemilihan umum. Singkatnya, semua bentuk aksi gerakan populer, aksi rakyat yang mengatasnamakan suatu hal, dan semua orang dan organisasi yang mendukung hal-hal tersebut bisa disebut sebagai gerakan sosial. Sementara itu, Touraine (1981, 1988) mengidentifikasi keterkaitan gerakan sosial dengan adanya konflik dominan yang sudah ada dalam masyarakat. Menurut Touraine, gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang terorganisir dari aktor berbasis kelas yang berjuang melawan kelas yang menjadi lawan (musuh) untuk mengambil kontrol sosial secara historis dalam sebuah komunitas yang konkret.

Gerakan sosial yang dilakukan mahasiswa karena mahasiswa sebagai aktor aktif dan kreatif sehingga mahasiswa itu akan terlibat dalam aliran perilaku secara terus menerus (Giddens, 1984). Keterlibatan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial: kepemimpinan, kebebasan politik yang maksimal, komunikasi internal, ideologi merupakan prasyarat pembentukan kelompok mahasiswa pelaku kekerasan. Karena mobilitas itu meningkat, solidaritas kelompok semakin digantikan oleh kompetisi antarindividu.

Ada beberapa mahasiswa diorganisasi sedemikian rupa sehingga ada konsistensi yang tinggi dalam posisi dari orang-orang dalam pelbagai organisasi dimana mereka termasuk. Pemimpin-pemimpin dan ideologi mungkin sangat berbeda menurut kemampuannya untuk menggerakkan dan

*merangsang tindakan kekerasan kolektif. Tingkat kebebasan politik mahasiswa di kampus besar, begitu pula kebebasan eksternal (sistem politik) tingkat lokal dan nasional. Tingkat komunikasi antaranggota (alumni dan mahasiswa) dalam suatu kelompok mahasiswa dan intensitas dan frekuensinya mungkin berbeda-beda. Perbedaan dalam pola komunikasi dapat mencerminkan perbedaan dalam solidaritas internal dalam kelompok kekerasan mahasiswa.*

Kondisi struktural bisa bervariasi dalam kasus yang berbeda-beda, mungkin ada variasi juga dalam keadaan subyektif individu tentang kepentingan bersama dari mereka serta orang-orang lainnya dalam kelompok itu. Beberapa mahasiswa diorganisasi sedemikian rupa sehingga ada konsistensi yang tinggi dalam posisi dari orang-orang dalam pelbagai kelompok/organisasi dimana mereka masuk. Ini berarti bahwa individu-individu yang berada dalam posisi subordinat dalam suatu kelompok mahasiswa juga berada dalam posisi subordinat dalam kelompok/organisasi mahasiswa yang lain.

Tingkat kekerasan sangat bervariasi, mulai dari negosiasi yang penuh ketenangan hingga kekerasan terbuka termasuk serangan fisik. Alat yang digunakan itu menentukan sifat kekerasan dan dapat meningkatkan intensitas kekerasan dan juga konflik. Ini artinya kekerasan dan konflik berhubungan satu sama lain. Ada kondisi-kondisi dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatnya kekerasan dalam konflik.

Kekerasan dalam konteks ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku, baik terbuka, tertutup, menyerang maupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain. Kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian. Kekerasan tertutup adalah kekerasan yang tidak secara langsung, seperti mengancam. Kekerasan agresif adalah kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan individu-individu yang memiliki kecenderungan membentuk kelompok dengan

mengedepankan identitas berdasarkan kesamaan kepentingan, ras, agama atau etnik. Identitas ini teraktualisasi pada saat seseorang berinteraksi dan berbenturan identitas, kepentingan.

Kekerasan dapat terjadi disebabkan adanya deprivasi relative yang terjadi dalam kelompok. Artinya, perubahan sosial tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistim sosial dan masyarakat. Adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut Le Bon, dalam kekerasan kolektif ini peranan pemimpin sangat besar sekali. Mereka menjadi kekuatan penting untuk memobilisir massa dan ciri yang menonjol adalah berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi sosial. Individu-individu yang berada dalam suatu kelompok/crowd dianggap saling meniru, sehingga saling memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya. kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama.

Menurut Le Bon, kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi sosial. Individu-individu yang berada dalam suatu kelompok/crowd dianggap saling meniru, sehingga saling memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya. Kekerasan kolektif ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kekerasan kolektif muncul dari situasi kongkrit yang sebelumnya didahului oleh sharing gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam kurun waktu yang lebih lama. Masalah bersama merupakan faktor yang paling penting dan bisa melibatkan perasaan tentang bahaya. Karena itu, gerakan yang bersifat anomi dapat menyebar dan meluas secara emosional.

Teori tentang kekerasan kolektif ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kekerasan kolektif muncul dari situasi kongkrit yang sebelumnya didahului oleh sharing gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam kurun waktu yang lebih lama. Masalah bersama merupakan faktor yang paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya. Oleh Gurr dikatakan bahwa individu yang memberontak sebelumnya harus memiliki

latar belakang situasi, seperti rasa ketidakadilan, kemarahan moral dan kemudian memberikan respon terhadap sumber penyebab kemarahan tersebut.

Terjadinya perilaku agresif selalu mensyaratkan keberadaan frustrasi dan, sebaliknya, bahwa keberadaan frustrasi selalu menimbulkan beberapa bentuk agresi. Dalam konsepsi Charles Tilly, ketidak-puasan atau frustrasi rakyat tidak secara otomatis menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan kekerasan atau aksi politik, kecuali jika mereka menjadi bagian dari satu kelompok yang terorganisir yang mempunyai beberapa sumber daya. Selanjutnya Tilly menegaskan kekerasan kolektif terjadi secara langsung dari pusat proses-proses politik dalam suatu masyarakat daripada mencerminkan ketegangan dan ketidak-puasan masyarakat. Sehingga insiden kekerasan kolektif sesungguhnya hanya merupakan akibat dari proses normal dari persaingan kelompok untuk memperebutkan kekuasaan dan tujuan tertentu.

#### **2.4. Faktor Habitus dan Lingkungan**

Secara teoretik habitus mahasiswa dapat dikategorikan sebagai habitus kekerasan. Hal ini didukung oleh lingkungan dan struktur social yang ada. Habitus dalam konsepsi Bourdieu adalah sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktek-praktek yang telah diadaptasi atau disesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi. Habitus sebagai struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Dalam hal ini, aktor dibekali seperangkat sistem nilai, norma dan pengetahuan di lingkungan manapun ia berada, seperangkat sistem (baca: modal) tersebutlah yang nantinya berguna untuk "menghadapi dunia". Dengan demikian, habitus bersifat diciptakan dan menciptakan, atau dengan kata lain "struktur yang menstruktur" (*structuring structure*). Dengan demikian, habitus dipandang sebagai produk internalisasi struktur. Habitus juga merefleksikan distribusi obyektif dalam struktur seperti misalnya jenis kelamin, umur, ataupun kelas sosial.

*Habitus* mendasari terbentuknya ranah, sementara di lain pihak ranah menjadi lokus bagi kinerja *habitus*. Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Istilah modal digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Modal dalam perspektif ilmu ekonomi, memuat beberapa ciri penting, yaitu: (1) Modal terakumulasi melalui investasi; (2) Modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan; (3) Modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya.

Oleh karena *habitus* akan berbeda-beda sesuai dengan posisi orang dalam kehidupan sosial. Orang yang berposisi sama cenderung berkebiasaan yang sama pula, sehingga kita dapat menganggapnya sebagai fenomena kolektif. Kebiasaan ini diperoleh dari pengalaman hidup manusia. Dalam hal ini bisa mungkin terjadi *habitus* yang tak wajar, yang oleh Bourdieu disebut "hysteresis" dimana orang yang tumbuh dalam kebiasaan tertentu dipaksa hidup pada kebiasaan (*habitus*) lain.

Kebiasaan mahasiswa melakukan kekerasan akibat peraturan akademik yang mendukung. Mahasiswa memiliki kebebasan penuh untuk berekspresi dan tidak diperlakukan represif, dibungkam oleh pemerintah. Hal itu tercermin dalam kehidupan kampus. Tetapi di sisi lain, ada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang mendukung kebebasan untuk berekspresi termasuk untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam hal ini budaya Siri'. Dapat dikatakan bahwa *habitus* adalah struktur sosial yang diinternalisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus diwujudkan. *Habitus* yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode histories yang relative panjang. *Habitus* dalam istilah Bourdieu menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dan tindakanlah yang mengantarai *habitus* dan kehidupan sosial. Menurut Bourdieu, *habitus* semata-mata mengusulkan apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk sebaiknya dilakukan.



Sehingga demonstrasi, perusakan, tawuran, dll merupakan kebiasaan yang dipraktikkan mahasiswa.

Kebiasaan yang dimiliki individu-individu sebagai mahasiswa merupakan kepribadian khas dari habitus mahasiswa Makassar. Pembentukan dan berfungsinya *habitus* seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung-pangkalnya. Di satu sisi sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku dan di lain sisi modalitas praktiknya mengandalkan pada improvisasi dan bukan pada kepatuhan aturan-aturan. *Habitus* juga merupakan struktur intern yang selalu dalam proses restrukturisasi, jadi praktik dan representasi tidak sepenuhnya deterministik (pelaku bisa memilih), namun juga tidak sepenuhnya bebas (pilihannya ditentukan oleh *habitus*). *Habitus* sebagai pola persepsi, pemikiran dan tindakan yang bertahan dalam jangka panjang, dan disebabkan oleh suatu kondisi objektif itu tetap berlangsung, direproduksi sehingga membangkitkan praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial, bahkan ketika kondisi tersebut sudah berubah.

Sementara konsep lingkungan (*field*), menurut Bourdieu merupakan jaringan hubungan antar posisi obyektif, yang terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. *Field* atau arena atau lingkungan dianggap sebagai wadah perjuangan. Lingkungan adalah kompetisi pasar yang melibatkan berbagai kapital, yakni kapital ekonomi, sosial, kultur, dan simbol. Adapun hubungan antara habitus dan lingkungan, menurut Bourdieu dibedakan menjadi dua, yakni lingkungan akan mengkondisikan habitus, dan dilain sisi habitus akan membentuk lingkungan.

Dalam kaitannya dengan hubungan keagenan-struktur, Bourdieu melihat hubungan antara habitus dan lingkungan, di mana lingkungan lain pada umumnya adalah universitas dianggapnya sebagai tempat kompetisi untuk menentukan keanggotaan dan hirarkinya, serta berfungsi sebagai modal dalam menghasilkan suatu keuntungan yang dijamin oleh universitas (lingkungan). Singkatnya, ranah sebagai arena pertarungan dianggap terlalu mereduksi dunia kehidupan pada pertarungan semata. Ranah social dan politik bukan saja arena kompetisi dan kontestasi melainkan juga tempat bagi

*pelaku untuk mendapatkan makna hidup, seperti kebebasan berekspresi, maupun untuk menunjukkan jati diri sebagai mahasiswa.*

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1. Pengantar**

Terkait dengan permasalahan studi ini, tujuan dilakukannya penelitian tentang kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Makassar secara umum adalah untuk memaparkan dan menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi berulang-ulang dan menyebabkan munculnya stigma terhadap mahasiswa Makassar yang identik dengan perilaku kekerasan/kebrutalan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang terjadinya fenomena kekerasan mahasiswa dengan cara melihat kembali keterkaitan factor-faktor social dengan kekerasan itu. Karena itu penelitian ini berupaya untuk mengkonstruksi secara social cultural tentang fenomena kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Makassar.

Penelitian tentang kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Indonesia sudah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian ini berusaha untuk fokus pada kekerasan mahasiswa di Makassar yang mulai marak terjadi menjelang, masa reformasi (Orde Baru), dan sesudahnya sampai hingga sekarang. Fokus kajian penelitian ini adalah kekerasan dan vandalisme mahasiswa. Apakah fenomena budaya kekerasan yang melekat pada mahasiswa itu terkait dengan kebijakan pendidikan? Bagaimana mahasiswa memahami budaya kekerasan itu? Apa implikasi budaya kekerasan mahasiswa terhadap eksistensi mereka ke depan?

### **3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: pertama adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan keterkaitan faktor-faktor social (status mahasiswa, kultur lokal, lingkungan kampus, lingkungan

*masyarakat, dan struktur masyarakat umumnya) dengan munculnya budaya kekerasan. Kedua, mempelajari dan mengkritisi kebijakan pendidikan tinggi terutama kurikulum terhadap reproduksi budaya kekerasan dalam komunitas mahasiswa Makassar. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah:*

1. Menganalisis secara sosial kekerasan politik mahasiswa serta seluruh potensi kekerasan yang akan mempengaruhi kehidupan kampus dan masyarakat kota Makassar.
2. Memetakan, menganalisis, dan menjelaskan terbentuknya budaya kekerasan dalam komunitas mahasiswa
3. Menganalisis dan menjelaskan bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan, baik dalam bentuk mediasi, kebijakan pendidikan dan resolusi cepat dalam mengurangi/meniadakan kekerasan/vandalisme mahasiswa.
4. Penelitian ini bertujuan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Selain itu, untuk merumuskan resolusi pada pihak-pihak yang berkonflik agar mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak

### **3.3. Manfaat Penelitian**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan (DIKTI) dan di tingkat kampus dalam mengelola kurikulum dan praksisnya. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan praksis kepada semua stakeholder pendidikan tinggi dan masyarakat luas tentang perlunya upaya untuk demistifikasi budaya kekerasan dalam komunitas mahasiswa.

*Semenetara itu, dari aspek kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam rangka menyempurnakan peraturan tentang pengelolaan aktivitas mahasiswa di kampus yang lebih responsive, akomodatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi koreksi dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi di lapangan yang cenderung menimbulkan berbagai gesekan yang menimbulkan kekerasan yang telah menyebabkan berbagai bentuk pengrusakan fasilitas umum serta mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan banyak pihak.*

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 2.2. Pengantar

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan mengenai asumsi-asumsi desain penelitian, prosedur pengumpulan data, prosedur pencatatan data, prosedur analisa data dan langkah-langkah pembuktian dengan mengacu pada model prosedur yang dijelaskan oleh John W. Creswell (2002: 138). Dipilihnya metode ini karena untuk menjelaskan dan memahami kekerasan mahasiswa secara sosial kultural. Pemilihan metode kualitatif terkait dengan kebutuhan penelitian untuk mengkonstruksi secara sosial kultural kekerasan dan vandalisme mahasiswa baik di kampus maupun di luar kampus, serta kondisi sosial politik yang melingkupinya (budaya Siri') termasuk interaksi dan relasi social kultural mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan masyarakat, termasuk aktor-aktor di dalam kampus dan di luar kampus.

#### 4.2. Asumsi-asumsi Desain Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yang berakar dalam antropologi budaya dan sosiologi. Pendekatan ini mengutamakan proses investigasi untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengklasifikasikan subjek penelitian, yakni kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Beberapa asumsi teoritik dalam penelitian ini kami rumuskan sebagai berikut: kekerasan mahasiswa di Kota Makassar cenderung digunakan sebagai metode/alat untuk mendramatisasikan tuntutan-tuntutan (*instrumental*) maupun

*penegasan identitas (constitutive)* yang telah terinternalisasi dalam perilaku keseharian mahasiswanya. Dari asumsi yang diangkat di dalam penelitian sebagaimana kami rumuskan di atas, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yang membatasi penelitian pada bidang disiplin ilmu politik, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kaitan dengan sosiologi, antropologi dan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Penelitian ini bersifat interpretatif sehingga bias, nilai, dan penelitian dinyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar yang telah menjadi jalinan rantai yang sedemikian rupa sehingga sudah mengkhawatirkan berbagai pihak.

#### **4.3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif karena penelitian ini bertujuan menjelaskan dan memaparkan secara rinci factor-faktor social yang menyebabkan terjadinya kekerasan, dinamika, dan dampaknya pada mahasiswa sebagai actor intelektual yang memiliki peran dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan dalam tataran praktis dan akademis untuk mengurangi kekerasan mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasinya dan kepentingannya. Sehingga analisis penelitian ini mengutamakan penejelasan tentang mengapa dan bagaimana factor-faktor sosial kultural mempengaruhi munculnya kekerasan mahasiswa baik secara individual maupun kolektif. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan keterkaitan faktor kultur kekerasan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar dengan perilaku kekerasan dan vandalisme. Bagaimana budaya kekerasan itu dibangun dan dipraktikkan mahasiswa dalam hidup kesehariannya. Untuk menafsirkannya data yang diperoleh dibutuhkan penggalan data dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menginterpretasi pandangan dan pendapat informan sesuai dengan konteks dan pengalamannya.

#### **4.4. Unit Analisis dan Subyek Penelitian**

*Unit analisis penelitian ini ialah mahasiswa, pemerintah dan masyarakat. Ketiga pihak ditempatkan sebagai actor yang berperan dalam terjadinya aksi-aksi kekerasan baik untuk merespon kebijakan atau isu nasional maupun isu lokal.*

Subyek penelitian ini adalah para informan sebagai yang mewakili institusi dan pribadi. Informan yang mewakili institusi terdiri institusi pendidikan tinggi (universitas), organisasi kemahasiswaan (BEM), ekstra kampus (HMI, KNPI, PMII dll), pemerintah (DPRD dan kepolisian), serta media massa. Sedangkan informan pribadi adalah mahasiswa pelaku kekerasan, aktivis, mantan aktivis dan beberapa anggota masyarakat. Pemilihan informan itu didasari pertimbangan tentang kemampuan, kompetensi untuk memberikan informasi data yang khusus dan dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini (Newman, 2003; Bryman, 2004).

Proses pencarian informan yang berasal dari institusi digunakan melalui teknik penjajagan melalui informan pertama yang dapat memberikan informasi tentang subyek yang berasal dari beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kalangan media dan organisasi ekstra dan intrakampus.. Informasi dari informan-informan itu kemudian dipelajari dan dipertimbangkan secara metodologis apakah memiliki kompetensi untuk diwawancara dalam konteks menjanging data kekerasan mahasiswa di Makassar. Sedangkan untuk wawancara dengan informan yang bersifat personal digunakan teknik snowballing. Cara ini untuk menjanging pelaku kekerasan, mantan aktivis, dan mahasiswa yang ikut dalam aksi-aksi kekerasan.

#### **4.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data: pengamatan, wawancara mendalam, dokumentasi (kajian Iliteratur), dan diskusi kelompok terfokus. Teknik pengamatan untuk merekam data primer dengan memperhatikan kondisi factual di lapangan. Teknik wawancara mendalam untuk menggali data primer dilakukan dengan beberapa informan



*kunci*. Untuk memperoleh informan-informan kunci digunakan teknik bola salju (*snowballing*), sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang kekerasan mahasiswa.

Pengamatan perilaku mahasiswa dan aktivitas mahasiswa di lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap kondisi obyektif kampus, lokasi kampus, dan kondisi social budaya masyarakat Makassar. Wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai tatap muka melalui panduan wawancara yang telah dipersiapkan.

#### **4.6. Teknik Analisis Data**

Memperhatikan kerangka teoretis/konseptual penelitian ini maka teknis analisis data dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama seleksi data, pemilahan dan kategorisasi data. Data yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisis, diinterpretasi berdasar aspek-aspek yang diteliti. Data primer dan sekunder diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Berdasar data catatan wawancara selama di lapangan. Kemudian melakukan sistematisasi data dari setiap data yang telah dipilah itu. Setelah data diurut sesuai dengan peristiwa dan konteksnya kemudian data itu dinarasikan secara kronologis menjadi alur penjelasan. Tahap selanjutnya adalah interpretasi dan elaborasi melalui penafsiran dan pengembangan analisis dengan mengaitkan antara satu tema dengan tema lainnya (Newman, 2003).

Dalam tahap analisis ini dilakukan penyamaan dan pembedaan terhadap peristiwa kekerasan yang dilakukan mahasiswa. Tafsiran data dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan.

#### **4.7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi Kota Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Makassar sebagai *melting pot*; (2) Angka kekerasan mahasiswa di Makassar secara kuantitatif cukup signifikan daripada yang ada di kota-kota lainnya; (3) Kekerasan/perusakan fasilitas public yang dilakukan mahasiswa memiliki kekhasan daripada kekerasan mahasiswa di kota lain terkait dengan dimensi reproduksi kekerasan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1. Pengantar**

Pilihan mahasiswa untuk memperjuangkan sesuatu nilai atas nama kebaikan bersama/kepentingan umum seringkali berujung pada kekerasan. Kekerasan itu bukan tujuan tetapi sarana (alat), sehingga kekerasan itu tidak dapat dimaknai sebagai kekerasan itu sendiri, tetapi sebagai alat yang berfungsi jamak--alat untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat ideal maupun praktis.

Tujuan itu selalu diperjuangkan, dan terkait dengan nilai yang dianggap benar dan harus diperjuangkan, sehingga kekerasan dalam konteks ini jauh dari domain gerakan politik. Contoh adalah kekerasan yang terjadi di kampus pada saat Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek) pada suatu universitas merupakan suatu indikasi bahwa mahasiswa gemar menempuh cara-cara kekerasan dan selalu mengekspresikan kekerasan itu pada perilaku kesehariannya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa kecenderungan itu merefleksikan kondisi social kultural masyarakat Makassar. Pada tataran normatif, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dan peran untuk melakukan kontrol sosial. Selain itu, mahasiswa dalam lingkungan kampus dikonstruksi secara akademis dan mental untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan memberi koreksi sosial pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemampuan untuk berpikir kritis, berolah nalar menjadi modal sosial bagi mahasiswa dalam menafsirkan realitas sosial ekonomi dan politik empiris yang melingkupinya. Tanpa adanya kemampuan berpikir kritis dan menggunakan nalar pada diri mahasiswa dalam bertindak dan memahami realitas menyebabkan mahasiswa itu tidak lebih dari mesin kekerasan yang menghasilkan kebrutalan.

*Mahasiswa sebagai mesin kekerasan bukan sesuatu yang berada di luar diri mahasiswa, tetapi mesin itu diciptakan dan digunakan oleh mahasiswa untuk membunyikan berbagai realitas, baik realitas ketimpangan, kesenjangan, ketidak-adilan, dan lain sebagainya. Berbagai realitas sosial, budaya, ekonomi maupun politik yang tidak sesuai dengan pemahaman atau persepsi mahasiswa diartikulasikan dengan kekerasan, seolah-olah kekerasan adalah segalanya dan menjadi pilihan rasional sebagai cara untuk memecahkan setiap persoalan yang ada. Persoalan ini menjadi masalah yang pantas dikritisi secara ilmiah guna merumuskan pemecahannya yang sangat penting untuk meminimalisir perilaku mahasiswa yang destruktif itu.*

Menganalisis kecenderungan perilaku mahasiswa yang sudah membentuk habitus itu itu diperlukan pembacaan atas nilai-nilai sosial kultural secara empiris. Sejauh mana nilai-nilai kekerasan yang berada dalam kultur Siri' menjadi salah satu acuan nilai yang menyebabkan terjadinya kekerasan?

Dalam penelitian ini, mahasiswa sebagai kelompok mahasiswa orang dari berbagai etnis/suku dan bahasa yang berkumpul dalam suatu institusi pendidikan. Karakter kolektif mahasiswa dapat menjadi energi positif bagi perubahan sosial politik masyarakat dan negara, tetapi di sisi lain, kasadaran kolektif itu dapat meremukkan solidaritas internal mahasiswa itu.

Sebagaimana telah dirumuskan di depan bahwa kajian ini berupaya merumuskan penjelasan yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan koreksi dan masukan atas kebijakan pendidikan tinggi dan pengelolaan kegiatan mahasiswa di kampus baik di tataran lokal maupun nasional. Konkritnya, keseluruhan analisis dan interpretasi data penelitian diharapkan dapat mengkonstruksi realitas sosial budaya penyebab kekerasan dan vandalisme sekaligus merumuskan rekomendasi akademis dan praktisnya.

## **5.2.Konstruksi Sosial Kekerasan**

Mahasiswa sebagai habitus kekerasan dan kampus merupakan arena tempat diproduksi dan direproduksi berbagai bentuk kekerasan itu. Sebagai

*habitus*, perilaku kekerasan merupakan perilaku kolektif yang dieskpresikan dalam bentuk tawuran, perkelahian, pengeroyokan, demonstrasi antara mahasiswa antarfakultas, antaruniversitas, antarorganisasi intrakampus, antarorganisasi ekstrakampus dan perkelahian antara aparat keamanan dan mahasiswa dan sebagainya. Konflik secara terbuka itu terjadi pada tahun 1998 ke atas, begitu signifikan peningkatannya. Tetapi akhir-akhir ini sejak tahun 2010 konflik antarmahasiswa sudah berkurang. Informan menjelaskannya sebagai berikut:

”...Konflik sebelum reformasi itu 98 itu ya sudah lama terjadi ya dengan aparat dan konflik mahasiswa dengan birokrasi ya tetapi memasuki tahun2 diatas 1998, itu ya sesama mahasiswa, jadi kalau saya sebut UNM tadi disitu, konflik antar kelompok mahasiswa dan fakultas, ini kan tadi terjadi juga di UNHAS konflik antar fakultas dengan fakultas, sospol konflik dengan mipa sospol dengan peryntanian sospol dengan teknik ya bahkan sospol pernah jadi musuh bersama, eh maaf teknik jadi musuh bersama dari fakultas-fakultas yang ada di UNHAS, jadi itu tapi diperguruan tinggi lain semacam itu dilokasi penelitian, Itu konflik antar mahasiswa dengan fakultas...”

Selanjutnya dikatakan bahwa: ”Dari 2006 sampai 2008 itu ya, dicatetan saya saja itu sampai lebih 10 kali terjadi konflik itu dan waktunya itu terjadi waktu penerimaan mahasiswa baru, pada saat penerimaan mahasiswa baru...disitulah terjadi konflik-konflik.” Penjelasan informan ini dapat ditafsirkan sebagai fenomena kekerasan itu terjadi berulang-ulang, dari tahun ke tahun dan fenomena itu dapat disebut sebagai indikasi dari reproduksi kekerasan.

Dalam konteks ini, secara nyata kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh faktor sosial artinya ada peran faktor struktur menyebabkan terjadinya kekerasan itu. Struktur kampus, pemerintahan lokal setempat, dan struktur masyarakat. Struktur kampus mulai dari jenjang kuasa tertinggi yaitu Rektor sampai pada jenjang di tingkat Fakultas berperan dalam munculnya praktik kekerasan mahasiswa. Kampus bukan ajang regulasi aparat akademis untuk melucuti

kekuatan mahasiswa, tetapi kampus adalah arena akademik tempat mengasah nalar yang bermental akademis dan bermoral.

Demikian pula dengan struktur pemerintahan lokal yang ada di Makassar bukan suatu lembaga alih-alih kekuasaan yang dibangun dengan sistem klientisme maupun paraohialisme, tetapi sebagai tempat kerja birokrat dalam menjalankan obligasi-obligasinya untuk melayani publik sesuai dengan wewenangnya. Karena itu, pemerintah lokal seharusnya dapat membaca dan mengambil sikap apabila kekerasan mahasiswa itu telah melampaui kelaziman. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan regulasi untuk mencegah kekerasan yang diikuti dengan perusakan fasilitas publik.

Mahasiswa sebagai aktor intelektual yang berada dalam arena kampus memiliki kebebasan berelasi dengan aktor-aktor yang ada (ekonomi, politik) di arena kampus maupun di luar kampus. Yang paling mengesankan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengeksploitasi nilai budaya yang ada di masyarakat, nilai kekerasan budaya. Nilai-nilai kekerasan itu melingkungi keseharian mahasiswa, nilai itu nyata dan dipraktikkan. Hingga pada akhirnya, mahasiswa menjadi terbiasa untuk melakukan kekerasan bahkan kekerasan mahasiswa sudah distigma sebagai identitas baru mahasiswa dan ironisnya kekerasan dianggap sudah menyatu dengan kehidupan mahasiswa. Artinya, eksistensi mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, lingkungannya dan *atau* sistem sosial budayanya.

Menurut penuturan informan bahwa:

"...Masalahnya di UIN yang biasanya melakukan demo-demo di UIN itu senior-senior yang kuliahnya tidak beres, yang semester 10an ke atas. jadi temen-temannya sudah selesai mereka belum, temen-temennya sudah KKN mereka belum. Jadi mereka itu yang sering demo, sekitar sepuluh sampai duapuluh orang teriak-teriak. Kalau sudah ada yang meliput mereka, mereka berhenti. Saya rasa ini adalah bagian dari imbas reformasi karena sebelumnya tidak begitu..."

Informan lain mengatakan bahwa: "...dalam beberapa kasus konflik itu memang diawali oleh orang-orang yang tidak bisa diketahui identitasnya,

*misalnya datang melakukan konflik itu memakai dengan menutup memakai topeng kejadiannya malam dan sebagainya...”*

Kecenderungan kekerasan dan vandalisme mahasiswa Makassar untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya secara sengaja atau tidak telah melemahkan kearifan kultur lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi rentan dan dirugikan dengan perilaku mahasiswa itu, tetapi didalam kehidupan nyata masyarakat telah ada kondisi (kemiskinan) yang secara empirik dimanfaatkan secara sistematis oleh aktor intelektual untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemecahan masalah kerusakan mahasiswa di Makassar dengan berbagai implikasi yang timbul, tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan kerusakan, demonstrasi anarkis, kekerasan saja, melainkan harus ditempatkan sebagai isu penting dan kritis yang perlu dianalisis dalam kerangka regulasi aktivitas mahasiswa dan kebijakan pendidikan tinggi yang menyangkut penataan kurikulum dan partisipasi politik di tingkat organisasi intra dan ekstra kampus.

*”...Jadi tergantung dari konteksnya itu, kalau masalah tawuran mereka itu sering terjadi kalau penerimaan mahasiswa baru, persaingan mereka untuk mencari anggota organisasi ekstra. Kalau kontak dengan masyarakat, pernah ketika itu tapi tidak hanya mahasiswa UIN saja, cuma dipusatkan di depan kampus UIN itu gabungan dari BEM beberapa kampus di Makassar Berhadapan dengan masyarakat. Dosen mempengaruhi adek-adk mahasiswa untuk masuk dalam organisasi ekstra. seperti organisasi HMI, PMII dan juga organisasi daerah seperti bugis, dll. Jadi kalau isu etnis, bisa bergabung dengan perguruan tinggi. Seringnya kasusnya ada yang meninggal. Kalau itu yang antar etnis...”*

Ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai sebab dan akibat dari ditempuhnya format aksi mahasiswa dengan kekerasan dan vandalisme. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kepentingan publik akan direspon oleh mahasiswa dengan berdemonstrasi/unjuk rasa sampai pada tindakan anarkis dan vandalisme.

Mahasiswa adalah aktor plural bukan aktor tunggal dengan kepentingan tunggal. Mahasiswa terdiri dari beragam etnis, bergabung dalam

berbagai fakultas, dan menyatu dalam berbagai universitas/institut baik negeri maupun swasta. Sebagai aktor plural mahasiswa memiliki kepentingan yang plural pula. Pluralitas kepentingan itu dapat menjadi pemicu konflik dalam mahasiswa tersebut. Secara eksplisit pluralitas mahasiswa memberi indikasi adanya *potensi konflik internal*. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

"...Sebenarnya kalau mereka ada demo, kita melakukan dialog, kita kumpulkan, baru kita simpulkan apa tuntutananya. Cuma kadang-kadang yang nakal –nakal yang sudah putus kuliah itu yang sering ngompori, yang di DO 12 anak itu mereka masuk lagi ke kampus dan memprovokasi teman-teman dan adek-adek... Saya kira ada itu, kan kulturnya orang disini keras jadi pada saat bersamaan mereka juga bisa lembut juga. orang disini ketika misalnya berteman dengan seseorang atau merasa juga, itu bagian bahkan itu mereka memaki untuk membantu teman, tapi kalau terlanjur sangat jengkel atau kecewa itu, begitu juga itu..."

Informan mengatakan:

"...Kalau di UNM itu, di UNHAS semua perguruan tinggi di Makassar ini semua penduduk asli menjadi minoritas yang paling banyak dari luar, tetapi di luar kampus memang biasa terjadi konflik antar suku jadi ada kelompok2 itu tetapi itu tidak terbawa masuk ke kampus, macam di UNHAS itu kan terjadi konflik yang diperumahan itu ya antar mahasiswa dari kelompok ini dengan mahasiswa dengan kelompok ini mangkannya saya sempat teliti karena wilayah perbatasannya itu rumah saya, jadi setelah tawuran saya pindah dari situ..."

Persoalan kekerasan tidak hanya terjadi di kampus, melainkan juga di luar kampus. Mengapa hal ini terjadi? Data di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan adalah fenomena kompleks/bersifat jamak. Artinya penyebab kekerasan yang dimunculkan melalui aksi unjuk rasa/demonstrasi merupakan serangkaian dari fenomena kompleks yang tidak berdiri sendiri, yang disebabkan oleh faktor struktural dan juga sosial kultural. Sehingga untuk menjelaskan, memahami, dan mencari solusinya memerlukan analisis yang memasukkan analisis faktor sosial kultural. Pemecahan atas persoalan kekerasan membutuhkan pemecahan masalah yang komprehensif dalam bidang pendidikan, dan kelembagaan. Upaya praktis dan strategis penting segera dirumuskan kedalam kebijakan pendidikan mulai dari tingkat kampus,

*local, dan nasional. Sehingga solusi problematika kekerasan mahasiswa bisa tuntas, sifatnya tidak parsial dan bukan hanya mengalihkan kekerasan dari kampus ke luar kampus atau sebaliknya dari luar kampus ke kampus dan dari masa ke masa.*

### **5.3.Faktor-Faktor Sosial Pemicu Kekerasan: Habitus Mahasiswa**

Perubahan politik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam terjadinya kekerasan di kampus dan di luar kampus. Mahasiswa menjadi aktor penggerak yang menentukan keberhasilan program/tujuan organisasi. Dalam beberapa kasus, isu nasional menjadi salah satu pemicu dilakukannya kekerasan mahasiswa. Selain itu, situasi sistem politik yang menjunjung demokrasi, keterbukaan dan inkusi partisipasi masyarakat menyebabkan setiap orang untuk mengeskpresikan aspirasi dan kepentingannya dengan cara-cara demokratis. Otoritas dominan dalam konteks ini terlihat dari serangkaian regulasi kebijakan pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam berbagai bentuk, baik keputusan Menteri maupun Peraturan Pemerintah.

Mahasiswa sebagai individu maupun kolektif adalah bagian dari masyarakat, sehingga eksistensinya sangat menarik untuk dikaji secara kritis dan mendalam. Secara normatif mahasiswa merupakan aktor intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan menjunjung kebenaran berdasar prinsip-prinsip etik/moral.

Hal ini dipertegas dengan pendapat informan:

”...Maaf ya..satu hal yang saya temukan dalam penelitian saya itu seorang ya, bukan lagi seorang begitu banyak masyarkat, setiap ada konflik dikampus maka saya juga ikut terlibat, masyarakat yang mengatakan itu terutama anak-anak muda sekitar kampus karena kampus kami itu salah satunya dikelilingi oleh perkampungan masyarakat jadi ketika mereka tawuran, berkelahi dan sebagainya dengan lempar batu, botol dan sebagainya, masyarakat kenaka maka mereka sebaliknya mereka akan melakukan pelemparan yang sama...”



Meski tidak semua mahasiswa gemar melakukan kekerasan dan sebagai pelaku kekerasan, tetapi sebagian besar fenomena keseharian kampus saat ini dipenuhi dengan kekerasan mahasiswa, mulai dari tawuran antarmahasiswa hingga tindakan perlawanan terhadap campur tangan aparat keamanan dalam konflik-konflik mahasiswa itu. Dosen sebagai tenaga akademik tidak jarang terlibat dalam kekerasan. Tentang hal ini tidak demikian di UNM. Menurut informan:

”...Dalam kasus yang kita pahami di UNM ini nggak ada, justru menurut saya jelas dosen itu menjadi kartu pengaman sebenarnya, karena cuman masalahnya ketika tawurannya sudah membesar ya jangankan dosen, keamanan saja gak berani setengah2 itu karena senjata yang digunakan oleh pelaku kekerasan itukan luar biasa sampai menggunakan kalau nonton apa ya..difilm saya itu dihasil rekaman itu kan hasilnya luar biasa pakek sabet, pakek senti,....pakek panah yang...oh luar biasa...”

Dalam masa pemerintah Orde Baru dan Orde Lama, demonstrasi yang banyak dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan menimbulkan berbagai bentuk kerusakan tidak muncul sesering sekarang. Gerakan dan perjuangan politik mahasiswa saat itu mencerminkan sosok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritik-kritik sosial politik terhadap pemerintah dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif, bukan destruktif. Pemerintah juga memiliki kepekaan dalam merespon koreksi mahasiswa itu. Kondisi itu tercipta karena didukung dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan mahasiswa sebagai aktor yang apolitis (depolitisasi mahasiswa melalui kebijakan NKK/BKK). Dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, mahasiswa kembali menjadi garang dan korektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Indikasi ini ditunjukkan dari fakta sejarah, mahasiswa berhasil menjadi aktor yang dapat menghantarkan perubahan sistem politik Indonesia dari otoriter ke demokrasi. Habitus mahasiswa, khususnya di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan fenomena yang hampir sama—demonstrasi yang diikuti kekerasan dan vandalisme. Habitus mahasiswa berbeda-beda dari setiap kota tetapi secara umum sama. Perbedaan habitus terkait dengan posisi mahasiswa dalam kehidupan sosial dan konteksnya,

tidak setiap mahasiswa memiliki kebiasaan yang sama. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan/daya nalar yang tinggi diasumsikan memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang berbeda dengan mahasiswa yang lebih mengutamakan emosi dan egonya dalam memahami dan menafsirkan realitas politik yang ada di sekitarnya. Begitu pula, mahasiswa yang menduduki posisi dalam struktur organisasi kemahasiswaan intrakampus (BEM, dll) akan memiliki orientasi sikap dan perilaku yang berbeda dengan yang berada di luar struktur organisasi kemahasiswaan intrakampus dan ekstra kampus. Dalam konteks ini habitus mahasiswa menjadi fenomena kolektif dan juga individual. Habitus memungkinkan seseorang memahami dunia sosial dan politik, tetapi dengan adanya banyak habitus mahasiswa berarti kehidupan sosial dan struktur sosial politik menyebabkan aktor-aktor mahasiswa berbeda.

Sikap dan perilaku mahasiswa pada dasarnya disesuaikan dengan masa dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mahasiswa tidak bisa melepaskan konteks sosial kulturalnya dalam kehidupan kesehariannya. Artinya, aksi-aksi kekerasan mahasiswa memiliki hubungan dengan situasi dan kondisi yang ada. Mahasiswa adalah agen/aktor yang secara akademik memiliki kemampuan berpikir kritis, mengutamakan nalar dalam berpikir dan bertindak dan menjunjung tinggi moral dalam mencari kebenaran. Tetapi kondisi mahasiswa di Makassar saat ini sudah memprihatinkan, hampir tidak ada hari tanpa kekerasan. Apakah mahasiswa masih memiliki rasionalitas dan nalar?

Preferensi mahasiswa untuk melakukan praktik kekerasan merupakan cerminan dari struktur sosial yang ada di sekitarnya. Apa yang dilihat dan dipahami oleh mahasiswa kemudian ditafsirkan, diinternalisasi dalam kehidupannya kesehariannya di kampus dan di luar kampus dan hal ini berlangsung terus menerus. Mahasiswa menjadi terbiasa untuk mempraktikkan kekerasan. Seorang informan mengatakan:

"...iya juga masyarakat juga marah pada mahasiswa dan sekarang yang paling aneh yang terjadi dimakassar ini masih belum kita, masih susah untuk kita temukan di wilayah-wilayah lain, akhir-akhir ini yang terjadi dimakassar ketika ada demonstrasi atau gerakan2

*mahasiswa pasti ada selalu kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ dan ini dampaknya...”*

Dengan demikian mahasiswa Makassar bukan hanya menjadi penyambung lidah rakyat tetapi juga diprovokasi oleh rakyat/masyarakat. Sehingga tak pelak mahasiswa di Makassar distigma sebagai aktor yang melekat dengan ciri kekerasan. Tetapi pada sisi lain, dengan sendirinya, aparat kepolisian setempat yang menghadapi demonstran, juga ada di urutan teratas, karena cara penindakan mereka dalam berbagai peristiwa tak kalah brutalnya. Menghadapi rangkaian aksi memprotes skandal Bank Century beberapa bulan lalu, polisi bahkan sempat dua kali menggunakan taktik memprovokasi (atau setidaknya) membiarkan sekelompok anggota masyarakat menyerang mahasiswa yang hingga mundur ke kampus di Jalan Sultan Alauddin dan Jalan AP Pettrani. Lalu digambarkan bahwa masyarakat sudah jengkel dengan ulah para mahasiswa yang sudah mengganggu kepentingan umum dalam menjalankan aksinya.

Mahasiswa sebagai produk histories menciptakan tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Sejarah mahasiswa pasca Orde Baru menunjukkan suatu kebiasaan yang mempraktikkan kekerasan. Pengalaman atau riwayat kekerasan itu diperoleh melalui pengalaman hidupnya (mahasiswa generasi Orde Lama dan Orde Baru). Mahasiswa menafsirkan fungsi positif dari kekerasan, seperti ditunjukkan oleh sejarah tumbangnya rezim Orba dimana mahasiswa menjadi salah satu aktor utama penggulingan rezim itu. Kemudian dari itu, mahasiswa generasi berikutnya menganggap bahwa dengan cara kekerasan sesuatu akan berubah dan hal ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan.

Kekerasan mahasiswa di Makassar merupakan ekspresi dari nalar kritisnya atau sebaliknya? Kritisisme mahasiswa didukung oleh sistem pendidikan tinggi yang kondusif, dimana kehidupan mahasiswa di kampus tidak lagi berada dalam kerangkeng besi pengawasan aparat negara dan ideologi yang represif. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan memiliki ruang untuk berekspresi. Kebebasan itu pula yang

telah mengantarkan mahasiswa kembali masuk dalam kerangkeng besi irasionalitas yaitu kekerasan dan vandalisme. Aksi-aksi demonstrasi di kampus maupun di luar kampus merupakan wujud dari rasionalitas mahasiswa. Tentu saja, kekerasan itu tak terlepas dari struktur sosial budaya yang melingkunginya. Budaya kekerasan didukung dan direproduksi oleh budaya setempat, yakni Siri'.

#### 5.4.Kebebasan Politik yang Maksimal

Meski ada mekanisme untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan, namun mahasiswa lebih memilih cara-cara kekerasan. Kebebasan politik menjadi modal mahasiswa dalam melakukan demonstrasi sebagai cara menyelesaikan masalah dan menarik perhatian pemerintah atau aktor yang dituju. Tidak hanya itu, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa juga dapat dimaknai sebagai tebalnya tembok kekuasaan di kampus maupun di struktur politik sehingga menghalangi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasinya.

Hal ini didukung dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa keributan, kerusuhan perlu dilakukan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah/aparat. Tanpa cara itu, mustahil seruan-seruan mereka didengar dan direspon. Mekanisme perwakilan konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara kelembagaan sudah tersedia, yakni DPRD, sementara itu di kampus ada BEM, ada Pembantu Dekan yang membindangi kegiatan kemahasiswaan, di tingkat universitas terdapat Pembantu Rektor yang mengurus segala sesuatu terkait mahasiswa. Tetapi tatanan-tatanan pendidikan dan konstitusi itu sekadar ada dan jarang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi.

Peranserta aparat dan elite politik dan elite kampus berperan dalam konteks ini. Ada beberapa kategori kekerasan yang dapat dibedakan dari latarbelakangnya yaitu kekerasan yang di *setting* (direkayasa secara sosial politik) dan tidak di *setting* (tidak direkayasa secara sosial politik). Kekerasan yang di *setting* itu cenderung memiliki ambang batas anarkis dan diikuti dengan perusakan. Implikasi tuntutananya luas mencakup kepentingan

politik. Sementara kekerasan yang tidak di setting memiliki lingkup yang praktis, mudah diselesaikan dengan campur tangan elite kampus maupun aparat keamanan.

Kekerasan yang direkayasa (*disetting*) oleh elite kampus maupun elite politik tidak dapat diakhiri jika belum ada intervensi dari aparat keamanan. Aparat represif negara yaitu polisi pamong praja maupun polisi berperan pada terjadinya kekerasan-kekerasan yang terjadi. Data penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian informan yang diwawancarai (kalangan aktivis mahasiswa, akademisi, dan anggota DPRD) memberikan contoh pencopotan jabatan Kapolda Sulawesi Selatan terkait dengan peristiwa demo mahasiswa dan situasi politik Jakarta yang memanas. Kesadaran mahasiswa juga dapat dibangun atas dasar solidaritas antarmahasiswa dalam merespon kebijakan dan peristiwa politik nasional dan lokal (isu Bank Century, isu pemilihan Gubernur, isu pemilihan Rektor, dan kedatangan Presiden SBY ke Makassar, dll).

Sebagian besar informan mengungkapkan tentang demonstrasi mahasiswa Makassar yang ditunggangi oleh aktor di luar mahasiswa, khususnya para politisi. Adanya kepentingan aktor lain dalam aksi demonstrasi mahasiswa (*free riders*) sebenarnya untuk pengalihan isu politik lokal maupun nasional. Politisi ditempatkan seolah-olah sebagai penggerak kekerasan itu. Argumentasi demikian memudahkan untuk menempatkan mahasiswa sebagai subordinat dari para politisi. Kenyataan ini dapat diterima karena data penelitian dari FGD menunjukkan bahwa mahasiswa memerlukan cantolan politik untuk mengekspresikan ego-egonya dan terutama kepentingan untuk masa depannya. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi intra dan ekstra kampus menjalin komunikasi secara teratur dengan para politisi. Relasi sosial dan politik antara politisi dan mahasiswa bersifat saling menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari fenomena/indikasi dari demonstrasi yang berujung pada kerusuhan yang hampir selalu bersamaan waktunya dengan peristiwa politik yang cukup besar, baik itu Pemilu, Pilkada, dan momen politik penting dan besar lainnya. Realitas keterlibatan aparat negara (polisi) masuk (menyerbu) kampus UMI

beberapa tahun lalu misalnya berujung pada pencopotan Kapolda Sulsel yang saat itu dijabat oleh Irjen Yusuf Manggabarani.

Seolah-olah ada komitmen di komunitas mahasiswa terhadap kekerasan sebagai strategi untuk menggalakkan perubahan social dapat memiliki akibat yang bisa menuju hal positif dan juga sebaliknya negative. Keterlibatan yang actual dalam tindakan kekerasan untuk melawan struktur kekuasaan yang menekan sangat mengandung risiko. Bagi mahasiswa yang bersedia menanggung risiko itu menunjukkan komitmen mereka yang tinggi terhadap gerakan perubahan social.

Keberhasilan dalam melakukan tindak kekerasan dapat merupakan ukuran prestasi lain untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa untuk ikut melakukan kekerasan berikutnya. Kekerasan itu juga memberi inspirasi pada masyarakat non mahasiswa untuk memperlihatkan komitmen mereka dengan cara yang sama dramatisnya. Hasilnya adalah solidaritas yang semakin menguat dari tindakan kekerasan itu sebagai partisipan mengatasi kepentingan pribadi untuk mencapai maksud tersebut.

#### **5.4.1. Solidaritas dan Egosentrisme Fakultas**

Antagonisme antara mahasiswa yang berlainan latarbelakang atau fakultas dapat bersatu karena bersatu dan solider, dan ada persamaan cultural/etnik, jumlah kepentingan bersama dan tingkat perlawanan yang menekan perubahan yang dihadapi dalam kelompok lawan. Perpecahan yang muncul, mendalam dan kekal antara fakultas yang bermusuhan itu berakhir apabila banyak kepentingan dan nilai sama dalam masing-masing mahasiswa dalam fakultas itu. Dalam situasi ini, permusuhan yang mendalam antara fakultas yang bertentangan itu cenderung diungkapkan dalam konflik yang non-realistik. Menurut Coser (1967), konflik kekerasan biasanya berakhir jauh sebelum pihak yang kalah kehabisan semua kekuatannya Pihak yang kalah itu mengajukan suatu tanda yang memperlihatkan keinginan mereka untuk berdamai. Akan tetapi, tanda seperti itu dapat menghentikan tindakan permusuhan hanya saja jika mereka memiliki pengertian yang sama. Figur tokoh mahasiswa yang kuat seringkali menjadi symbol untuk menghentikan

*kekerasan yang terjadi. Munculnya pemahaman bersama tentang arti simbolis dari peristiwa permusuhan itu merupakan ikatan yang penting antara pihak-pihak yang bermusuhan/bertentangan karena membantu mengakhiri konflik sebelum salah satu pihak mengeluarkan banyak biaya social, yang terlihat dari bentuk dominasi satu fakultas terhadap fakultas yang lain.*

Ada tiga unsure yang menentukan terjadinya kekerasan terjadi di kampus. Pertama adalah pada saat prosesi penerimaan mahasiswa baru (Maba). Kedua, ketika proses pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ketiga, pemilihan pimpinan perguruan perguruan tinggi, di tingkat rektorat dan fakultas. Keempat adalah suhu politik di masing-masing daerah. Keempat factor itu menjadi konteks dan setting mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai pilihan yang akhirnya berujung pada kekerasan dan perusakan fasilitas dan barang milik masyarakat/pemerintah.

Konflik antar fakultas bisa dibilang merupakan refleksi dari perasaan lebih unggul dari fakultas yang lainnya. Seorang informan dari kalangan akademisi menuturkan:

*"...Pada tahun 2005 ada peristiwa pembakaran fakultas di Unhas. Penyulutnya diduga terkait dengan konflik mahasiswa antar fakultas. Lalu sejak itu muncul sentimen-sentimen mahasiswa FT dan FISIP. Mahasiswa FT mengungkapkan perasaan superioritasnya dengan mengatakan mahasiswa di luar FT adalah fakultas lain-lain....Perasaan superioritas itu melekat dalam pribadi-pribadi mahasiswa dalam suatu fakultas tertentu sebut saja Fakultas Teknik. Berbeda dengan Fakultas Kedokteran yang hampir tidak pernah terlibat tawuran. Padahal dari dimensi intelektual, mereka adalah orang-orang yang superior daripada Fakultas teknik. Kelompok mahasiswa yang merasa superior menyebabkan seringnya mereka melakukan tindakan agresif dan hal ini juga didukung oleh factor egosentrisme fakultas..."*

Menurut informan itu, tawuran mahasiswa antar fakultas itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja bukan semua mahasiswa FT secara keseluruhan. Faktor ini sebagai bentuk penegasan dari status dan prestige mahasiswa terhadap fakultasnya. Ada pandangan yang telah berakar kuat di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan

*Fakultas Teknik (FT). Pandangan bahwa mahasiswa FT statusnya lebih tinggi dari mahasiswa FISIP. Pandangan demikian merupakan refleksi dari kurikulum Fakultas Teknik.*

Menurut seorang informan yang menjabat sebagai wakil dekan FISIP bagian akademik mengatakan:

"Kekacauan itu terjadi tidak sendirian, beraninya dia tiga orang, lima orang atau tujuh orang, dia mengganggu satu acara, satu jurusan misalnya atau satu fakultas. Kalau dia di suruh keluar dia melawan. Kalau di pukul dia jadikan isu itu, dia lari ke teman-temannya dan kalau dia sudah berteriak ke fakultasnya itu secara otomatis itu muncul solidaritas syah, solidaritas fakultas, untuk melakukan penyerangan balik. Dan mahasiswa teknik itu, kalau ada solidaritas social di kampus itu tidak ada yang tanya gara-gara apa. Langsung dia bilang kita di pukul Sospol. Sudah otomatis itu 5 menit kemudian sudah ada serangan balik itu.

Dalam pemahaman Collins (1975) bahwa perilaku manusia khususnya individu terus menerus berjuang untuk memperbaiki posisinya dalam dimensi stratifikasinya (posisi ekonomi, prestisenya, dan kekuasaan politik). Sumber-sumber material itu sangat penting dalam menentukan posisi seseorang dalam sistem stratifikasinya. Individu yang berbeda dalam kontrolnya terhadap alat produksi mental, produksi emosional, dan kekerasan atau kekuasaan memaksa. Pentingnya produksi mental (sebagaimana dianalisis oleh Marx) yang dikembangkan oleh kelompok yang berkuasa dan mempromosikan suatu ideology yang melegitimasi posisi dominasinya. Alat produksi mental meliputi sistem pendidikan dan media massa.

Dalam konteks ini, mahasiswa di lingkungan FT terus menerus memproduksi nilai-nilai superioritas sebagai suatu fakultas yang memiliki nilai lebih daripada fakultas lain di UNHAS. Caranya adalah dengan membangkitkan emosi kebanggaan dari setiap individu mahasiswa hingga nilai dan emosi itu menjadi kesadaran kolektif mahasiswa FT.

Alat produksi emosional menunjuk pada sumber-sumber yang terlibat dalam menghasilkan ikatan-ikatan emosional pada masyarakat, terutama pada mereka yang berada dalam posisi memerintah. Ikatan emosional yang diciptakan melalui kesamaan etnis itu tidak terjadi secara



*spontan, keterlibatan individu-individu dalam kekerasan tidak seluruhnya mengesampingkan begitu saja kepentingan-kepentingan pribadi yang beragam. Terciptanya solidaritas emosional tidak menggantikan konflik, tetapi merupakan salah satu alat utama yang digunakan dalam konflik.*

Menurut informan:

"...perkelahian antar fakultas itu sering terjadi...Perkelahian antarfakultas, terlalu banyak orang yang terluka...apa itu bukan bukti kekerasan? Ada yang patah, ada yang pingsan, ada yang luka, yang pasti kurang lebih 80 orang, berdasarkan catatan rumah sakit gawat darurat. Atas dua dasar itu, rector mengatakan ini bukan pembinaan kemahasiswaan, jadi pak rector mengatakan saya setuju pembinaan kemahasiswaan, tapi saya tidak setuju dalam bentuk Ospek, dan akan melakukan pembinaan kemahasiswaan tapi bukan dalam bentuk ospek. Jadi caranya itu, pembinaan kemahasiswaan di lakukan di luar kampus. Kalau ya di luar kampus atau di jurusan masing-masing, sehingga tidak memicu perkelahian, tidak ada lagi arak-arakan keliling kampus begitu, kan biasa lari-lari keliling kampus, itu kalau lari-lari, misalnya sospel keliling itu pasti ada teknik itu yang menggoda-menggoda itu, dan biasa dia di pukul kalau dia menggoda atau mengganggu, misalnya .... Lain lagi, perkelahian antarmahasiswa. Dulu sebelum itu pertandingan olahraga antarmahasiswa, gambar jelasnya menjelang Dies Natalis, itu kan ada pertandingan antarjurusan, dosen, mahasiswa, pegawai. Itu teknik itu selalu menjadi pemicu. Misalnya di final sospel lawan teknik,... musuh bebuyutan... di anggap fakultas kita dipermalukan oleh fakultas teknik..."

Dari uraian di atas dapat ditafsirkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam arena fakultas juga dipengaruhi oleh keberadaan organisasi ekstra kampus dimana mahasiswa itu menjadi kadernya. Namun tak dipungkiri bahwa organisasi ekstra kampus yang solid dapat berfungsi meminimalisasi konflik antarfakultas/BEM. Semakin kuat larangan fakultas terhadap organisasi ekstra kampus maka semakin kuat mahasiswa menentangnya. Perlawanan demi perlawanan terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Tidak ada ikatan emosi tetapi justru membuka egoisme dan arogansi fakultas/kampus. Menurut informan bahwa: "Organisasi ekstra kampus yang *solid* dapat berfungsi meminimalisasi konflik antarfakultas/BEM. Semakin kuat larangan fakultas terhadap organisasi

*eskra kampus maka semakin kuat mahasiswa menentangnya. Tidak ada ikatan emosi tetapi justru membuka egoisme dan arogansi fakultas/kampus.”* Pendapat ini semakin memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa praktik kekerasan mahasiswa merupakan produk dari struktur sosial dan politik.

#### **5.4.2. Nilai Kekerasan dalam Budaya sebagai Faktor Konflik**

Faktor social budaya berperan dalam terjadinya kekerasan mahasiswa di Makassar. Fakta artikulasi yang hadir dalam kejadian-kejadian politik bisa memberi ilustrasi yang bagus. Pada saat mahasiswa berunjuk rasa dengan identitas kolektifnya ini terkait dengan isu-isu besar (nasional), maka subyektifitas politik sebagai bentuk perumusan eksistensi mahasiswa dan membedakan dengan yang lain dengan sendirinya muncul. Posisi artikulasi ini kemudian berdampingan dengan gesekan artikulasi pemaknaan yang lain misalnya tentang makna-makna aksi yang baik dan buruk. Pemaknaan baik dan buruk merupakan konstruksi sosial budaya. Budaya definisinya adalah kebiasaan dan nilai-nilai tertentu yang diakui secara umum oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu. Budaya merupakan produk kolektif atau bersama yang menghasilkan suatu ukuran dan rangkaian tindakan yang dipakai sebagai acuan untuk menilai tindakan orang lain. Budaya senantiasa berubah karena pengaruh berbagai kekuatan internal dan eksternal.

Dalam konflik sosial dan politik, budaya sering muncul sebagai faktor yang harus diakui dan diatasi karena pengaruhnya terhadap konflik. Budaya menentukan cara seseorang bertindak, dan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan pihak lain. Untuk mengurangi konflik harus memiliki pengertian tentang konteks budaya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ross (sebagaimana dikutip oleh Fisher, Abdi, et.al., 2000) berpendapat bahwa ada budaya konflik yang didefinisikannya sebagai kombinasi norma, praktik, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mereka bawa saat mereka masuk dalam pertikaian di antara anggotanya. Budaya itu mencakup nilai-nilai, bahasa, norma, keyakinan, dan tradisi. Informan menjelaskan sebagai berikut:

”...Kalau pengaruhnya itu ya karakter budaya orang Sulawesi Selatan itu agak keras, karakter tempramentnya agak tinggi, dan kalau dya merasa benar dya tidak mau mundur sekalipun berkelahi, kalau dia merasa benar, hanya persoalannya kadang-kadang tafsir kebenaran itu di tertibkan secara individual dan seringkali menerima informasi sepihak tidak melakukan check and the check, secara cultural orang Makasar itu mengistilahkan (*Pakpembangan Natolo*) artinya cepat panas dan boro campur nekat

Ada kecenderungan dalam masyarakat Makassar yang menganggap bahwa perilaku aksi mahasiswa yang berujung dengan hujan batu hingga penangkapan oleh aparat kepolisian adalah hal yang wajar, dan patut pula untuk aku yakini bahwa dalam diri individu kekerasan merupakan jalan lain atau mungkin pula implikasi dari kemauan untuk berkembang yang coba untuk dibentengi, dua premis ini bisa saja berlaku sebelum masyarakat Makassar melihat media massa yang bisa diakses di sela waktunya.

Dalam konteks social kultural, kekerasan dapat dikaitkan dengan konsep *siri' na pace* (bahasa lokal) yang artinya adalah mengutamakan sikap menjunjung tinggi martabat lokal, ini berarti bahwa sikap empati terhadap beberapa kejadian di belahan Indonesia yang lain telah telah membuat konsep *Siri' na pace* tersebut dikenal secara nasional. Istilah *Siri'* dalam makna harga diri dan keteguhan hati yang positif telah mengalami degradasi makna secara struktural dan fungsional. *Siri'* adalah suatu tatanan nilai sosial budaya yang mengatur tentang sesuatu yang harus dipertahankan, dibela, dihormati, dan dijunjung tinggi yang dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Selatan (yang terdiri dari suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja) yang mendorong masyarakat untuk kerja keras, berprestasi, berjiwa pelopor dan berorientasi keberhasilan. Rasa malu, kehormatan, harga diri menjadi bagian dari kata *Siri'* tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan istilah itu mengalami degradasi makna, artinya menjadi lebih sempit yaitu budaya kehormatan diri. Dalam konteks penelitian ini, budaya *Siri'* memberi peluang pada hadirnya budaya kekerasan dalam komunitas mahasiswa. Budaya *Siri'* adalah budaya lokal tetapi pemaknaannya tidak dapat digunakan untuk

*membenarkan/mengabsahkan praktik-praktik kekerasan mahasiswa. Berikut penuturan informan:*

”...Siri ini kan banyak perluasan-perluasan katanya, ada ni paka siri’ artinya di permalukan, ada juga siri’ artinya malu-malu, tumatsiri itu artinya orang yang membela atau keluarga yang membela lebih tepat itu, perempuan yang di bawa lari, kawin lari ni ceritanya, kawin lari atau di bawa lari itu tumatsiri, berangkat dari situ itu kalau itu yang tersentuh yang terlanggar itu orang Makasar itu mau mati, dan dia melawan siapa saja, yang menyebabkan ia malu...”

Dari wawancara itu menunjukkan bahwa kontrol atas alat kekerasan adalah struktur aparat keamanan, dalam hal ini militer dan polisi. Ancaman terhadap kekerasan atau paksaan selalu merupakan unsure yang potensial dalam setiap konflik. Mereka yang menguasai alat paksaan mampu memaksakan kemauannya pada orang lain dengan ancaman kekerasan. Hal ini dilakukan oleh aparat keamanan: polisi dan pemimpin kampus (mulai tingkat fakultas hingga rektorat: pembantu dekan dan rector bagian kemahasiswaan) yang biasa menggunakan instrument pendidikan untuk mengurangi kekerasan dengan memberlakukan kebijakan yang bersifat menghukum seperti skorsing sampai *drop out* (notabene adalah kebijakan yang bersifat paksaan kekerasan). Kebijakan ini mengurangi besarnya paksaan kemana mereka harus tunduk pada regulasi kampus. Ada juga pembenaran ideologis untuk suatu persebaran otoritas tertentu atau hubungan emosional dengan masyarakat dan para pemimpinnya tergantung pada persebaran yang berbeda dalam alat paksaan yang berupa kekerasan.

Informan mengatakan sebagai berikut:”... Latarbelakang mahasiswa anarkis karena ingin dikatakan eksis, dan mereka khawatir pemerintah tidak mendengar, mereka perlu melakukan tekanan bahwa ada isu penting: isu kebijakan BHP. Isu BHP hancurkan rektorat..dan ada saluran aspirasi yang tersumbat karena itu perlu saluran...”

Bentrokan mahasiswa yang menimbulkan kekerasan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Anarko, artinya bentrokan harus dilakukan dan harus menyerang lawan.

### 5.4.3. Kekerasan dalam Konteks Maskulinitas dan Siri'

Solidaritas kedaerahan/suku juga berperan pada terjadinya aksi-aksi kekerasan di kalangan mahasiswa. Salah seorang informan menunjukkan kekuatan solidaritas kesukuan dalam kekerasan:

"Pernah ada kekerasan antarmahasiswa antarsuku di suatu PTS di sini....Kekerasan itu terjadi saat mahasiswa itu marah karena ada mahasiswa dari suku Bone dan Palopo berantem. Kekerasan itu menjadi kekerasan besar karena ada solidaritas kesukuan, sehingga kekerasan itu ya antarsuku mahasiswa...salah satu dari mahasiswa suku tertentu itu membangun solidaritas..."<sup>1</sup>

Dalam pandangan antropolog Unhas:

"Elite dari kampung-kampung terkenal di Makassar memang menyiapkan ruang untuk demonstrasi hingga vandalisme...ada jagoannya yang sudah disiapkan termasuk preman kampus...ada relasi antara elite yang ditarik garis ke jalur praktis...ruang politik..."<sup>2</sup> Informan lain memberi contoh tentang kuatnya solidaritas kesukuan meningkatkan eskalasi konflik. Dalam budaya Siri' laki-laki jika mendapat tantangan atau ejekan dari laki-laki lain itu dipandang sebagai merusak harga diri. Katanya:"...Saya ini orang Bugis yang berani, dll..."

Ruang kontestasi yang terbuka antarmahasiswa dan antarkampus pada saat Pilkada (pemilihan gubernur dan wakil gubernur) tidak terlepas dari persaingan antaretnis (Organda) dalam merebut superioritas, dominasi dan hegemoni. Hal ini disebabkan kemajemukan etnis di Sulawesi Selatan. Kemajemukan etnis dan kepentingan masyarakat itu tak muncul dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tidak, karena pemerintah saat itu menerapkan kebijakan politik represif yang tujuannya meredam semua bentuk konflik kepentingan untuk tidak muncul ke permukaan.

Dalam konteks Pilkada dan peristiwa-peristiwa politik lain itu mahasiswa sering dimanfaatkan oleh kandidat dengan memanipulasi identitas dan simbol etnis untuk mendapatkan simpati dan suara sebanyak-banyaknya atas kandidat yang didukungnya itu. Kemajemukan etnis di Sulawesi Selatan

<sup>1</sup> Wawancara dengan informan yang berlatarbelakang pendidikan sosiologi, 22 Juli 2011.

<sup>2</sup> Wawancara dengan informan yang mewakili akademisi di kampus Unhas, 22 Juli 2011.

dalam analisa politik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan, satu sisi kemajemukan etnis tersebut menjadi sumber harmoni sosial dan akulturasi politik sementara disisi yang lain dapat menjadi sumber konflik dan disintegrasi yang laten. Superioritas, dominasi dan hegemoni salah satu etnis terhadap etnis lainnya terkadang melahirkan resistensi bagi etnis yang disubordinasi.

Aktifitas penutupan jalan terjadi di sejumlah titik. Seperti mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar di Jalan Sultan Alauddin, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) di Jalan AP Pettarani; serta mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) di Jalan Perintis Kemerdekaan. Fenomena kekerasan yang terjadi di Makassar bukan lagi perihal yang menyangkut pada kontinuitas kasuistik yang banyak di beritakan oleh beberapa media. Kekerasan di Makassar jauh menekankan pada aspek postulat kausalitas, yaitu hukum dan ketentuan-ketentuan sebab-akibat, reaksi dari suatu aksi. Hal ini merupakan substansi (kebutuhan) yang membentuk perilaku. Jika eksistensi masyarakat telah melebur ke dalam asosiasi sosial, mereka harus berintegrasi pada pranata dan sistem nilai yang ada. Begitupun dengan mahasiswa, eksistensinya tidak dapat dipisahkan untuk tidak berintegrasi pada statuta kampus yang dipecah kedalam *rule of the game* birokrasi.

Maraknya tawuran mahasiswa antar fakultas di Unhas pada 31 Agustus dan 1 September 2005 merupakan bukti vandalisme mahasiswa yang paling buruk karena diikuti dengan pembakaran kampus. Mahasiswa yang dalam polarisasi pemikiran seharusnya lebih bisa mengedepankan aspek dialogis dan lebih bisa memberikan reaksi kondusif terhadap situasi anarkis. Namun dalam kenyataannya ada kecenderungan mahasiswa berperan untuk menjadi aktor dari anarkisme. Ini bukan suatu peristiwa kebetulan, tetapi suatu tindakan yang diinginkan oleh mahasiswa sebagai pelaku. Tidak disangsikan lagi bahwa kekerasan yang dibangun/dikonstruksi oleh mahasiswa hampir tidak ada beda secara kualitatif dengan perilaku masyarakat nonmahasiswa. Masyarakat setempat bahkan tukang becak menyebut mahasiswa itu identik dengan preman. Penyamaan perilaku

mahasiswa dengan komunitas preman bukan tanpa alasan karena mahasiswa memiliki karakter dan perilaku yang menyerupai preman—tidak menggunakan nalar dan rasionalitasnya dalam berpikir dan bertindak, tetapi menggunakan emosi dan kekuatan fisiknya untuk melawan apapun/siapun untuk mencapai dan meraih tujuannya/kepentingannya.

Dalam beberapa kasus nampak dengan jelas bagaimana komunitas mahasiswa tadi dengan sadar secara brutal bertindak selayaknya sekelompok preman yang sedang mengamuk. Kode etik kependidikan dan rasa toleransi dalam kampus tidak lagi menjadi sebuah hal yang harus dikedepankan. Banyak hal yang mendasari terjadinya anarkisme mahasiswa tersebut. Mulai dari bentuk protes atas ketidak-cocokan dengan kebijakan kampus sampai dengan kepada pembelaan harga diri dan arogansi pribadi yang pada proses kelanjutannya dapat menimbulkan konflik horizontal dalam komunitas akademik tadi. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi yang patut dicarikan jalan keluarnya, ketika revitalisasi moral dan pembenahan akal budi mahasiswa dalam berpikir dan bertindak belum dapat segera dilakukan.

Suatu budaya yang bernama *Siri'* merupakan tradisi kekerasan yang mengandung nilai-nilai maskulin. Tidak seorangpun di Makassar yang jika menerima tantangan apabila ditantang oleh seseorang. Setiap generasi menafsirkan *Siri'* dengan caranya sendiri. Tradisi itu memiliki beberapa tafsir, yaitu: malu jika dijajah, malu jika tidak membawa nama baik keluarga, dan perempuan adalah simbol utama keluarga. Seorang laki-laki secara kultural bertanggungjawab menjaga kehormatan keluarga, dan kehormatan itu berada dalam figur perempuan.

Perangai orang Makassar secara kultural terkait dengan budaya *Siri'*--emosional, mudah marah. Dalam hal ini bukan untuk menyatakan dan mengidentikkan bahwa budaya *Siri'* adalah budaya kekerasan mahasiswa. Dalam penurutan salah seorang informan bahwa: "Segala sesuatu yang sepele sekalipun bisa menjadi awal perselisihan dan berujung pada kematian. Misal saja saling melirik bisa menjadi pemicu dan berakhir pada saling tikam." Orang Makassar menjunjung tinggi *Siri'* (harga diri/kehormatan/rasa malu). Seseorang boleh saja tidak memiliki apapun, tetapi sebagai orang

Makassar, ia harus memelihara dan menjunjung tinggi budaya Siri'. Perilaku keseharian harus berpijak pada nilai-nilai budaya Siri'. Sehingga peristiwa sekecil apapun yang terjadi di masyarakat dan mahasiswa umumnya selalu tampak unsur kekerasan.

Wawancara dengan informan menunjukkan Budaya Siri' sebagai acuan dalam berperilaku sehari-hari:

"...Jika menonton televisi, dan membaca berita-berita kriminal dari Makassar yang menonjol adalah kekerasan...Makassar mendominasi dibanding kota lainnya. Dalam hal demo, pemicunya adalah pemukulan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa kemudian mahasiswanya mengamuk dan menyerbu pos polisi..lalu konflik menyebar atas nama harga diri...Siri' tidak diungkap oleh media, media Cuma mempertontonkan kekerasan di Makassar..."

Dari data di atas dapat dipahami bahwa kehidupan masyarakat di Makassar meletakkan kehormatan di atas segalanya, dan dibalik kehormatan itu tersimpan potensi konflik. Begitu pula, interaksi mahasiswa juga terpola pada perbedaan-perbedaan kelompok, baik terkait dengan fakultas pada kampus tertentu maupun etnik.

Pembagian kelompok di dalam kampus tertentu menimbulkan solidaritas primordial yang kuat di kalangan anggota kelompok. Kelompok mahasiswa dari fakultas teknik menempatkan diri sebagai fakultas dominan/superior. Sedangkan fakultas non teknis seperti FISIP dll adalah fakultas yang ditempatkan inferior/subordinan. Di satu pihak terdapat solidaritas kelompok yang berbasis pada fakultas, di pihak lain terdapat juga solidaritas kelompok dalam mahasiswa yang berbasis pada suku/etnik/kedaerahan.

Dalam realitas kehidupan sosial di masyarakat dan di kampus, perbedaan kelompok ini direkat oleh kebudayaan lokal, yaitu Siri'. Hubungan-hubungan sosial itu merupakan jaringan kesatuan yang luas, dan menjadi perekat antar kelompok masyarakat yang berbeda, sebagai sebuah totalitas dan kesatuan budaya Makassar.



Keseluruhan kenyataan *social* itu terjalin bersama sejumlah tradisi sehari-hari yang ada dalam masyarakat Makassar (tradisi *Siri'*) yang akibat kumulatifnya adalah menciptakan dan memperkuat ikatan emosional antara seseorang/individu dan ikatan emosional dengan masyarakat (kelompok). Kenyataan masyarakat itu sendiri tergantung pada ikatan-ikatan solidaritas emosional yang diciptakan dan diperkuat melalui tradisi. Masyarakat seperti tipe struktur *social* yang lainnya tidak ada sebagai kenyataan obyektif, tetapi sebagai definisi subyektif yang dimiliki bersama yang diciptakan dan dipertahankan melalui interaksi. Sifat dari tradisi yang *ritualistic* itu terlihat dalam mempertahankan definisi subyektif tentang kenyataan *social* politik.

Untuk memperkuat kekerasan, mahasiswa juga menggunakan senjata (parang, badik) sebagai ungkapan ikatan emosional dan simbolik etniknya. Dalam posisi dominant dan tertentu, mahasiswa (secara kolektif) menyandarkan diri pada tradisi yang memperlihatkan sikap hormat (*seگان*) dari para subordinatnya, bukan paksaan fisik dalam rangka memperkuat dominasi mereka atas yang lain. Mereka yang berada dalam posisi subordinate mengembangkan ritus-ritus untuk mengungkapkan alienasinya atau kurangnya komitmen terhadap keteraturan *social* yang ada, terutama struktur kekuasaan yang ada di luar kampus mereka lebih terlibat. Pada semua tingkatan, pelbagai ritus digunakan untuk meningkatkan solidaritas emosional kelompok itu atau masyarakat, atau untuk memperkuat komitmen moral para anggota dalam menentang kelompok atau masyarakat lainnya (struktur kekuasaan formal di tingkat lokal dan nasional).

Solidaritas/komitmen moral dalam konteks ini harus dilihat sebagai alat yang digunakan individu mahasiswa maupun kelompok mahasiswa atau masyarakat untuk berusaha meningkatkan sumber-sumber atau perasaan subyektif superioritasnya. Ritus-ritus yang dibangun berdasar tradisi sangat berperanan dalam memperkuat komitmen individu terhadap nilai-nilai bersama itu. *Siri'* sebagai orientasi nilai budaya bersesuaian dengan pengaturan kebutuhan individu yang ternyata merupakan hal problematik dan tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya. Usaha untuk meningkatkan dan memperkuat komitmen moral dilihat sebagai strategi di

*mana individu berusaha mempengaruhi satu sama lain untuk memastikan kesetiaan satu sama lainnya. Namun, motivasi nyata yang mendasari nilai bersama mahasiswa itu adalah keinginan untuk mempertahankan atau menyempurnakan posisi ekonomi, status, bahkan kekuasaan (politik).*

Menurut salah seorang informan ada kekhasan nilai yang melekat pada masyarakat di Makassar. "Orang Makassar memiliki energi besar dan solidaritas tinggi. Jika ada temannya bermasalah maka terkadang bagi yang pendek akal nya, mau benar atau salah tetap dibela juga biar sampai dia jadi korban," begitu penuturannya. Masalah tawuran dan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa Makassar sebagian besar disebabkan karena di Makassar harga diri adalah segalanya, jika seseorang disinggung harga diri dan kehormatannya sekecil apapun itu maka mereka akan bereaksi. Ini merupakan kekuatan budaya yang sering berbaur dan menjadi energi terjadinya kekerasan antar mahasiswa maupun kekerasan untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah atau stakeholder di kampus.

#### **5.4.4. Regulasi Pendidikan: Otonomi Kampus dan Pendidikan**

Aksi-aksi kekerasan dan vandalisme (perusakan) yang berawal dari aksi demonstrasi bukan untuk pertama kali terjadi di Makassar, mahasiswa di tempat lain juga melakukannya. Kericuhan akibat ketidakpuasan atas putusan rektorat yang terjadi di Makassar tetap saja diklaim sebagai persoalan internal oleh mahasiswa. Padahal kalangan masyarakat di Makassar sudah mulai resah dengan aktivitas sebagai mahasiswa terhadap kampus mereka sendiri sendiri. Fakta empiris tentang realitas tawuran antar mahasiswa, baik dalam lingkup satu kampus maupun dengan kampus lain, telah cukup memberikan bukti ironis atas kebobrokan moralitas dari sebuah komunitas yang menamakan dirinya sebagai intelektualis ini. Mahasiswa yang dalam polarisasi pemikiran seharusnya lebih bisa mengedepankan aspek dialogis dan lebih bisa memberikan reaksi kondusif terhadap situasi anarkis. Namun dalam kenyataannya, mahasiswa sendirilah yang menjadi pelaku semua anarkisme tadi. Dalam peristiwa di atas nampak sama sekali tidak ada perbedaan yang menonjol antara mahasiswa dengan preman.

Peranan lembaga kemahasiswaan berangsur-angsur dimatikan oleh pihak kampus (birokrasi). Setidaknya proses pendewasaan dan pencerahan mahasiswa tidak lagi berjalan melalui perangkat-perangkat keilmuan yang tidak diperoleh di dalam ruang perkuliahan secara holistik. Di lain hal, konflik bisa menjadi polarisasi produk kampus, yang telah diapik secara sistematis dalam rangka pencapaian konspirasi kekuasaan yang dalam pandangan Dahrendorf disebut dengan kelompok semu (*quasi group*). Di berbagai tempat dan kesempatan konflik hadir dalam setiap ruang interaksi need and want manusia. Olehnya, prestasi kampus dapat dinilai dari sejauh mana institusi tersebut mampu mengangkat transformasi keilmuan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan statuta dan visioner perguruan tinggi yang sesungguhnya. Dengan demikian pengendalian dan penerjemahan konflik dapat diarahkan dan diminimalisir.

Upaya merumuskan resolusi untuk tidak terjadinya kekerasan mahasiswa adalah untuk membangun kembali keharmonisan struktur sosial bagi kebutuhan jangka panjang termasuk dengan melakukan suatu rekayasa tatanan sosial mahasiswa dan masyarakat kampus di Makassar. Bagaimanapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa, meski sebagai tindakan sah secara moral, peristiwa yang terjadi di Makassar merupakan suatu tanda bahaya yang dapat menuju pada situasi kacau. Selain itu juga sebagai tanda untuk memperingatkan anggota masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam struktur kekuasaan akan bagian yang adil atas penghargaan material dan social lainnya. Definisi tentang penghargaan yang adil itu bermacam-macam tergantung pada harapan mereka yang terlibat didalamnya dan pada nilai umum masyarakat luas. Sejauh tidak ada prosedur yang mantap untuk menerima dan merembukkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu, kekerasan mungkin menjadi satu-satunya pilihan, sehingga kelompok-kelompok yang dirugikan dalam masyarakat dapat didengar suaranya.

Salah seorang informan aktivis organisasi ekstra kampus berpendapat:

"...HMI selalu ikut dalam aksi, tetapi tidak kami definisikan sebagai kekerasan. Tindakan itu tidak memperoleh dukungan dari mahasiswa, ini dipengaruhi oleh beberapa hal dan merupakan gerakan dari beberapa elemen... Saya tidak sepakat bila aksi-aksi mahasiswa dengan kekerasan itu identik dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu membaca buku, yang jika tidak didampingi akan mewujudkan anarki..."

"...Ada setting, di mana pemerintah ingin melemahkan gerakan/kesadaran mahasiswa dan juga lembaga-lembaga intra kampus...Kebijakan pendidikan sekarang mencetak mahasiswa untuk cepat selesai kuliah, cepat kerja, dan ini didukung oleh orangtua di kampung. Ini semakin melemahkan lembaga-lembaga intra dan ekstra kampus. Mahasiswa tidak dinamis, dan sulit untuk berpikir kritis. Contohnya adalah mahasiswa baru ditarik ke BEM dll...BEM Universitas lebih carut marut lagi...mahasiswa tidak sendiri melakukan kekerasan, tetapi juga ada pengaruh dari organisasi-organisasi daerah (ORGANDA)..."

Pendapat informan di atas menunjukkan bahwa kekerasan itu tidak hanya merupakan refleksi dari kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi empiris yang mereka hadapi, tetapi ada peran dari faktor psiko-geografis yang memperkuat solidaritas kampung asalnya. ORGANDA-ORGANDA tidak hanya meningkatkan intensitas terjadinya kekerasan, tetapi juga media elektronik dan cetak juga. Faktor geografis dan bahasa yang hampir sama memberi kontribusi pada solidaritas suku tertentu, dan juga kekuatan solidaritas itu bisa memecah belah mahasiswa. Ini terjadi pada tahun 2009-2010. Mahasiswa baru umumnya didoktrin oleh kakak-kakak kelasnya di kampus untuk tidak ikut aktivitas lembaga-lembaga kampus. Acap mahasiswa itu melakukan kekerasan meski tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mahasiswa terlibat dalam tawuran antarwarga, dan yang melakukan kekerasan bukan warga tetapi mahasiswa. Ini disebabkan oleh kuatnya solidaritas/ikatan emosional suku/kedaerahan (ORGANDA) dalam diri mahasiswa yang membangkitkan kemarahan, dan menyebabkan mereka kerap melakukannya dan mengeskpresikan itu kedalam perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan yang muncul karena sentimen 'kesukuan' atau 'kedaerahan' jika persoalannya menyangkut kesukluian dan kedaerahan.

*Ini menjadi isu yang sangat sensitif yang dapat menimbulkan kekerasan antarmahasiswa didalam kampus dan di luar kampus.*

Salah seorang informan mantan aktivis kampus memberikan penjelasan tentang adanya tarik menarik tentang pentingnya mahasiswa terlibat dalam organisasi intra kampus. Berikut penjelasannya:

”...Pada tahun 2008, ada pengaruh peralihan antara ikut lembaga dan tidak ikut lembaga. Pada saat penyambutan mahasiswa baru, ada kalangan dosen yang tidak sepakat...karena itu akan menghilangkan karakter mahasiswa, padahal itu bermanfaat untuk menjadi bekal kerja, yang diperlukan sebenarnya adalah manajemen organisasi, dan bukan menyalahkan keberadaan mahasiswa dalam organisasi itu...mau diapakan mahasiswa dengan kurikulum pendidikan yang seperti sekarang...”

Informan menunjukkan suatu contoh kekerasan yang menyangkut pertarungan antarsuku. Berikut petikannya:

”...Peristiwa kekerasan mahasiswa antarkampus (STIMIK versus UMI) merupakan kekerasan yang intensitasnya kuat. Itu terjadi pada pemilihan Ketua BEM antara suku Palopo dan Toraja, di mana anak Bone ingin mengacaukan. Selain itu memang ada bawaan sejarah, dimana pahlawan Bone yaitu Arupalaka yang terkenal dengan keberaniannya dan heronya... dan lambang daerah yang identik dengan kekerasan yaitu Badik...Simbol-simbol kepahlawanan Arupalaka dan jargon-jargon tentang keberanian itu ditempel di mobil...ini sama artinya dengan reproduksi kekerasan dan simbol-simbolnya...tidak ada yang jago kecuali Arupalaka...”

Pendapat di atas mencerminkan tentang masih kuatnya penghormatan tanpa syarat terhadap diri seseorang yang dipandang sebagai pahlawan di daerahnya. Penghormatan terhadap diri pahlawan itu direproduksi dalam simbol-simbol kekerasan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh senior-senior dari daerah, dan secara historis memang ada perang antara Bone melawan Palopo yang akhirnya mempersatukan suku-suku di Sulawesi Selatan. Namun demikian, ada seorang informan yang berpendapat tidak seperti di atas. Citra mahasiswa bukan kekerasan. Ada isu-isu besar yang menyebabkan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa yang diikuti dengan penggunaan kekerasan. Ini terlihat dalam peringatan Hari Anti Korupsi. Dari

*data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa di Makassar itu beringas dan pro-kekerasan. Ada sebagian mahasiswa yang selalu berusaha untuk partisipasi dalam berbagai organisasi sosial politik untuk ruang berekspresi diri, dan atau aktualisasi diri, tetapi juga yang tidak memandang penting organisasi sebagai cara mengaktualisasi diri, sehingga mereka tidak tertarik untuk ikut dalam organisasi-organisasi intra maupun ekstra kampus.*

Faktor gaya hidup dan tekanan ekonomi juga berperan terhadap munculnya kekerasan di kalangan mahasiswa. Kebutuhan konsumtif mahasiswa terlihat dari kecepatan mahasiswa berkomunikasi. Aliran komunikasi menjadi lebih cepat dan lancar. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi memberi dampak yang beragam. Mulai dengan memutuskan komunikasi sosial dengan lingkungan, hingga memegang andil dalam pembentukan karakter seseorang terutama mahasiswa. Ini berarti bahwa teknologi komunikasi seperti handphone, blackberry, dll mendukung terjadinya kekerasan mahasiswa. Selain bersifat positif juga berdampak negatif. Karena itu, penggunaan alat-alat komunikasi seluler selain sebagai refleksi gaya hidup, juga merupakan ekspresi gaya hidup.

Menurut Informan:

*"...Yang melakukan itu biasanya mahasiswa dari daerah di sono... maksudnya ... dari kabupaten-kabupaten lain di Sulsel yang pergi merantau di kota makassar buat kuliah...hal itu didahului sebenarnya dari rasa ketidakpercayaan diri mereka terhadap lingkungan di kota.... baik dari kemampuan akademis ato bahkan gaya hidup....mereka tersesat diantara rasa pengen dianggap... ato istilah lainnya cari perhatian...dan akhirnya disalurkan dengan cara-cara seperti itu.....Dengan begitu mereka merasa bangga bisa ikut ato terlibat dalam yang namanya tawuran... karena di setiap tawuran pasti ada cerita dan didalam cerita itu mereka bangga kalo ada nama mereka disebut..."*

Dari data di atas menunjukkan bahwa fenomena kekerasan mahasiswa tak terlepas dari kebutuhan aktualisasi diri.

### 5.5. Rapuhnya Relasi Sosial antara Elite dan Mahasiswa di Kampus

Elite kampus berperan pada terjadinya kekerasan di kampus. Mahasiswa ditempatkan seorang aktor sosial, dalam hal ini sebagai individu-individu yang terlibat di dalam aksi untuk mewujudkan perubahan sosial. Penandaan mahasiswa sebagai *agent of change* merepresentasikan aktor sosial kolektif dalam hal ini pemuda Mesir, untuk mencapai makna yang menyeluruh atas pengalaman mereka dalam memanifestasikan realitas yang diproyeksikan sebagai suatu realitas yang realitas akan yang penuh keberanian, kekuasaan, dan kegigihan untuk mewujudkan realitas kebebasan melalui aksi yang tidak mempertimbangkan lagi nilai-nilai moral dan sosial budaya. Suatu pengalaman bersama untuk mencapai realitas ideal yang selama ini dikonstruksi bersama-sama melalui jejaring sosial maya, sedang dimanifestasikan secara kolektif oleh aktor-aktor revolusi realitas. Singkatnya para konstruktor realitas adalah mahasiswa



Sumber: Vivanews, Kamis, 9 Desember 2010, 16:51 WIB

Sistem pendidikan atau otonomi kampus yang tidak dibangun atas nilai-nilai pluralitas menyebabkan tertib sosial di dalam kampus dan di luar kampus menjadi rentan. SK hanya mencerminkan nilai-nilai apresiatif semu, di mana kampus dengan otonomi yang ada.

Nilai-nilai itu tidak melembaga dalam perilaku mahasiswa sebagaimana yang sering di blowup oleh media sebagai model gerakan massa yang menjurus anarkis

Salah satu penuturan informan:

“...Segelintir orang itu mungkin tidak melakukan manipulasi keadaan. Tetapi angle pengambilan gambar dari media yang begitu sempit yang membuat keadaan seperti menakutkan [saya yakin media pun tidak bermaksud memanipulasi] Padahal biasa-biasa saja keadaannya... Sudah beberapa kali saya membandingkan gambar di TV dengan keadaan sebenarnya. Kita melihat mereka berdemo sambil membakar ban pun tidak terlihat suasana mencekam, yang ada kita seperti menonton tukang obat atau bahkan seperti sedang menonton topeng monyet... Karena kadang sambil menonton ada kejadian<sup>2</sup> yang lucu yang membuat kita yang menonton tertawa...Ada upaya dari media untuk membesar- besarkan, atau ulah segelintir orang itu bisa memanipulasi keadaan sesungguhnya...”

Informan lain mengemukakan pendapatnya:

“...seringkali media massa menampilkan mahasiswa Makassar secara setereo tipe. Pernah kami menggelar aksi besar-besaran menolak BHP. Dalam aksi tersebut sama sekali tidak ada unsur kekerasan. Dan anehnya, media massa tidak ada yang mengekspos. Nampaknya, aksi mahasiswa Makassar yang nir-kekerasan dinilai tidak mempunyai nilai berita...”

Pendapat informan di atas merupakan suatu pemahaman tentang fenomena kompleks kekerasan yang memasukkan aspek rasional dan irasional. Artinya, mahasiswa membutuhkan saluran untuk ekspresi diri, terutama ekspresi identitas diri sebagai mahasiswa dan juga saluran untuk mengartikulasikan kepentingannya, yang terkait dengan kepentingan politik ke depan. Seperti untuk menduduki posisi tertentu dalam struktur politik atau jabatan-jabatan publik.

Aksi-aksi kekerasan memang seharusnya tidak terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa. Persoalannya kemudian yang muncul adalah apakah mahasiswa secara sosial budaya tidak menemukan saluran ekspresi diri yang baik atau mendekati ideal? Mahasiswa acap melakukan tawuran antarmahasiswa, lebih parah lagi tawuran dalam satu kampus (bakar kampus), *sweeping* KTP antar mahasiswa (dan ini mengandung unsur



SARA). *Terkait dengan kebutuhan untuk aktualisasi diri, mahasiswa dalam proses pengaktualisasian diri itu--mahasiswa mudah terkooperasi pada hal-hal yang primordialistik dan fanatisme sempit. Hal ini dipandang layak dipertahankan bahkan ditularkan terus kepada generasi/mahasiswa baru melalui proses indoktrinasi.*

Dalam proses aktualisasi diri itu mahasiswa membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas yang dibangun berdasarkan persamaan identitas (fakultas, daerah). Identitas tersebut dibawa ketika seseorang berinteraksi dan benturan antar identitas yang berbeda menjadi penyebab kekerasan.

Kekerasan antarmahasiswa dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif (dalam bentuk tawuran mahasiswa berbeda perguruan tinggi, berbeda fakultas) dapat dilihat dari: (1) adanya deprivasi relative yang terjadi dalam mahasiswa tersebut. Artinya, perubahan sosial yang diinginkan oleh kelompok mahasiswa tidak mampu ditanggap dengan seimbang oleh sistim sosial dan masyarakat. (2) kekerasan kolektif muncul dari situasi nyata yang sebelumnya didahului oleh sharing gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam kurun waktu tertentu. Ada situasi tertentu di masyarakat seperti ketidakadilan.

Lokasi kekerasan didalam kampus dan di luar kampus yang biasanya dengan menduduki jalan raya, membakar ban mobil sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Cara ini lazim digunakan untuk mempertontonkan kemarahan, emosi, kekuatan mereka kepada elite/pemerintah. Kemarahan yang diekspresikan mahasiswa merupakan bentuk ketidakmampuan sistem sosial/politik untuk mengakomodasi aspirasi mereka. Letupan ketidakpuasan, kekecewaan itu terjadi berulang-ulang.

Persoalan aksi-aksi kekerasan mahasiswa bukan masalah pemerintah, elite kampus saja, melainkan masalah masyarakat luas. Kehidupan kampus merupakan refleksi kehidupan masyarakat. Sehingga kekerasan mahasiswa adalah perpanjangan dari kekerasan yang ada di masyarakat.

#### **5.6. Anarkisme tanpa Moral**

### 5.6. Anarkisme tanpa Moral

Ada kesan yang ditangkap dari penelitian ini bahwa mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi dengan menggunakan teknik-teknik kekerasan itu berlangsung secara kompetitif dan prestatif tersumbat oleh kepentingan prestise pribadi dan kelompok, yang dipraktikan tanpa pertimbangan moral, terlebih etika kampus.

Anarkisme atau tindak kekerasan dapat menjadi situmulus untuk perubahan social melampaui solidaritas internal dari mereka yang terlibat didalamnya. Kekerasan juga untuk menunjukkan kepada anggota masyarakat yang lain, khususnya struktur kekuasaan tentang kesungguhan komitmen mahasiswa untuk memperjuangkan perubahan social. Sehingga menambah kepercayaan dan dukungan pada tuntutan mereka. Sebenarnya, ancaman kekerasan itu dikemukakan dengan jelas, mereka yang terlibat dalam suatu tindakan kekerasan yang bertujuan untuk perubahan, sehingga kekerasan dapat ditanggapi serius dan dapat dilakukan kompromi. Tetapi kekerasan yang tidak bertujuan, sekadar untuk memamerkan eksistensi sebagai mahasiswa adalah kekerasan yang tidak dapat ditolerir. Tidak ada tuntutan dan tujuan yang jelas terumuskan. Kekerasan jenis ini seringkali menimbulkan konflik dengan aparat keamanan setempat (pihak polisi dan aparat keamanan kampus).



Berbagai perilaku, baik dari pengunjuk rasa maupun oknum polisi yang tercela sering terjadi, lantaran keduanya tidak mampu menempatkan diri pada proporsinya masing-masing. Unjuk rasa memang salah satu bagian utuh dari demokratisasi, tetapi saat unjuk rasa anarkistis yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat terjadi, polisi akan hadir mengapresiasi. Manajemen konflik yang baik akan mampu menetralkan setiap situasi dan kondisi yang mulai genting menjadi redam dengan pendekatan persuasif dan saling memahami fungsi masing-masing. Polisi dan mahasiswa bisa menaikan diri seandainya pemimpin Polri bergerak cepat meredam pemicu yang menyebabkan mes HMI dirusak.

Mampukah polisi memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang baik bagi masyarakat yang kehidupannya serbadi-namis dan kompleks itu? Keberhasilan menangani terorisme, obat terlarang, dan berbagai tindak kejahatan lain belum bisa menjadi ukuran keberhasilan polisi secara keseluruhan. Polisi dan mahasiswa memiliki fungsi positif (polisi dan mahasiswa) dalam kehidupan bernegara, terpaksa harus berhadapan hanya karena keacuhan pejabat negara menerima dengan baik maksud pengunjuk rasa. Tidak mungkin lagi dinafikan, unjuk rasa merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengubah persepsi penguasa dari kekeliruan yang terus dilakukan.



Pengalaman buruk dari kekerasan mahasiswa Makassar selama ini, seyogyanya dijadikan momentum bahwa aspirasi yang menggunakan ruang

publik butuh tenggang rasa agar aspirasi yang disampaikan mendapat simpati rakyat. Ricuh antara polisi dan mahasiswa itu harus menuju akhir yang tidak saling menyakiti. Polisi perlu belajar pada pengalaman empiris yang banyak membuktikan bahwa aksi unjuk rasa bukan saja dapat memengaruhi kebijakan, melainkan juga bisa menjatuhkan pejabat polisi yang dianggap tidak mampu menetralisasi keinginan rakyat (mahasiswa) saat berunjuk rasa.

Kehadiran aparat kepolisian sebetulnya bukan sebuah pilihan yang harus ada di setiap tempat, lantaran terbatasnya personel polisi. Selaku polisi sipil, sebaiknya setiap personelnya mampu memahami watak warga masyarakat yang akan diamankan dan dilayani. Posisi polisi dalam mengamankan unjuk rasa seharusnya sebagai mediator untuk menjembatani keinginan pengunjung rasa dengan pejabat atau instansi yang menjadi sasaran pengunjung rasa. Mediator yang bijak dan profesional semestinya mampu meredam kemungkinan terganggunya kepentingan umum dengan kepentingan pengunjung rasa yang akan menyampaikan aspirasi.

Setiap aksi unjuk rasa, baik yang dilakukan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lain sudah pasti akan mengganggu kepentingan umum karena pengunjung rasa juga menggunakan ruang publik (fasilitas jalan) yang sama dengan warga masyarakat. Aspek itu jugalah yang perlu dipahami kepada warga masyarakat, bahwa aksi unjuk rasa tidak mungkin bebas dari penggunaan ruang publik. Penutupan jalan di depan kampus oleh pengunjung rasa, meskipun hal itu mengganggu ketertiban umum dan tidak boleh dilakukan, penyebab dari aksi itu juga harus ditelaah. Ada kesan akhir-akhir ini, para pejabat negara sudah mulai kebal dengan unjuk rasa lantaran hampir setiap hari melihat dan menjadi sasaran penyampaian aspirasi. dengan ganas dan liarnya para mahasiswa melempari dan merusak berbagai kantor polisi. Bukan hanya itu sebagian mahasiswa merusak fasilitas umum seperti rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, beton pembatas jalan dicopot dibuang di tengah jalan.

Tindakan brutal lainnya sekelompok mahasiswa menyandera mobil plat merah dan mobil polisi, dengan menginjak-injak, memecah kaca bahkan berusaha untuk menggulingkannya. Tindakan yang sulit diterima akal sehat

dalam negara yang berdaulat, ketika mahasiswa melakukan *sweeping* di jalanan terhadap polisi yang lewat di jalanan. Hal yang lebih memiriskan ketika mahasiswa menutup jalan, suatu ketika sebuah mobil ambulans dengan lampu menyala menerobos barikade mahasiswa. Spontan para mahasiswa menjadi beringas. Melempari ambulans tersebut sehingga kaca belakangnya pecah. Hal ini sangat patut disayangkan, karena apapun alasannya, meski dalam keadaan perangpun, tidak boleh ada yang menghalangi ambulans bahkan sampai melemparinya.



### 5.7. Peran Media, Kekerasan, Kesadaran Kolektif

Kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar sentimen etnis/suku telah menimbulkan tindakan kolektif mahasiswa. Tindakan itu merupakan bagian dari tindakan sosial yang terkait dengan proses sosial, melibatkan banyak pelaku. Tindakan kolektif merupakan perwujudan dari ketegangan-ketegangan struktural masyarakat sebagai akibat dari kompleksnya masalah ketimpangan/ketidaksamaan struktural (sosial, ekonomi, politik) yang ada di masyarakat—ketidakpuasan-ketidakpuasan. Tindakan kolektif terpusat pada kondisi-kondisi eksternal tindakan manusia dalam konteks suatu keseluruhan sosial, yakni pada alasan-alasan sosial aksi massa.

Untuk menurunkan tingkat kericuhan antara polisi-mahasiswa di Makassar, semua pihak harus introspeksi diri. Mahasiswa selaku calon intelektual memiliki peran dengan mengapresiasi aturan hukum dan menghargai hak-hak orang lain dalam menggunakan ruang publik. Misalnya,

*tidak menutup jalan secara serampangan, merusak fasilitas umum, sampai bentrokan dengan aparat kepolisian. Pengalaman buruk selama tiga hari itu, seyogianya dijadikan momentum bahwa aspirasi yang menggunakan ruang publik butuh tenggang rasa agar aspirasi yang disampaikan mendapat simpati rakyat. Ricuh antara polisi dan mahasiswa itu harus menuju akhir yang tidak saling menyakiti. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus mampu menahan diri dan bersikap persuasif, bersahabat, dan berpenampilan sipil saat berhadapan dengan mahasiswa. Polisi perlu belajar pada pengalaman empiris yang banyak membuktikan bahwa aksi unjuk rasa bukan saja dapat memengaruhi kebijakan, melainkan juga bisa menjatuhkan pejabat polisi yang dianggap tidak mampu menetralisasi keinginan rakyat (mahasiswa) saat berunjuk rasa.*

Aparat penegak hukum dapat membedakan mana kekerasan yang mengandung konflik etnik dan *atau* antarsuku dan tidak. Perkelahian/perseteteruan/tawuran antarsuku, polisi akan berperan sebagai penonton, dan tidak melakukan fungsinya sebagai penegak hukum. Itu adalah cara aman, dan mereka tidak memiliki daya untuk melawan kekuatan suku tersebut selain mereka adalah bagian dari suku itu. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan juga dimanfaatkan oleh kelompok elite tertentu yang berada dalam struktur politik. Penjelasan salah seorang informan: "...Seringkali kekerasan yang ada merupakan komando dari elit tertentu.. mereka—elit—seperti main catur. Memberi komando, perintah dan lapisan bawah akan bergerak, dan kemudian terjadilah penyerangan aparat itu dengan brutal, bahkan ada yang sampai masuk kampus..."

Fenomena lain yang menampilkan perlawanan terhadap pemerintahan yang sekarang. Ini terjadi sewaktu Presiden SBY datang ke Makassar. Sebagai refleksi kritis ketidaksukaan pada pemerintahan SBY maka kedatangan SBY mendapat perlawanan dari mahasiswa. Bentrokan tidak terelakkan antara mahasiswa UNM (Universitas Negeri Makassar) yang kampusnya terletak tak jauh dari tempat acara SBY berada. Ada perang batu yang digencarkan mahasiswa melawan satuan polisi. Presiden SBY segera meninggalkan tempat itu dan polisi melanjutkan bentrokannya dengan

mahasiswa. Sebelum itu, di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas 45, satuan polisi yang jumlahnya lebih kecil menjadi sasaran lemparan batu mahasiswa dan sempat tunggang langgang dikejar mahasiswa. Mahasiswa juga menyandera sebuah mobil tangki Pertamina dan merusak mobil dinas yang melaju di jalan raya.

Seorang pengurus organisasi ekstra kampus menyatakan:

”Organisasi KNPI merupakan perwajahan mahasiswa di Makassar. Tetapi saya tidak setuju kalo dibilang mahasiswa itu brutal...makna brutal tidak tepat ditempelkan pada gerakan mahasiswa Makassar...Jika tidak setuju dengan pendapat saya perlu ada pendekatan lain untuk menjelaskannya...Karena letak geografis Jakarta dengan Makassar yang jauh itu produk wacana...misalnya isu komunis di UMN, sehingga perlu menarik media untuk menyuarakan keinginan-keinginan mahasiswa Makassar. Konflik antarkelompok ada dirancang elite ato di design oleh negara dengan menggerakkan mahasiswa...Frustrasi mahasiswa Makassar yang tidak mampu mencari ruang ekspresi mencari panggung...”

Pendapat di atas menunjukkan bahwa mahasiswa terlepas digerakkan oleh elite atau direkayasa oleh kelompok tertentu, mahasiswa membutuhkan media untuk aktualisasi diri. Mahasiswa ada yang membangun jaringan dengan struktur kekuasaan yang berada di luar kampus. Mereka membutuhkan jaringan itu sebagai cara untuk mencapai kepentingannya. Organisasi ekstra kampus sering konflik dengan mahasiswa di kampus. Organisasi ekstra kampus memiliki kader dan biasanya yang mereka memperebutkan posisi tertentu dalam struktur kekuasaan di tingkat lokal maupun nasional.

Kehadiran aparat kepolisian sebetulnya bukan sebuah pilihan yang harus ada di setiap tempat, lantaran terbatasnya personel polisi. Selaku polisi sipil, sebaiknya setiap personelnya mampu memahami watak warga masyarakat yang akan diamankan dan dilayani. Posisi polisi dalam mengamankan unjuk rasa seharusnya sebagai mediator untuk menjembatani keinginan pengunjuk rasa dengan pejabat atau instansi yang menjadi sasaran pengunjuk rasa. Mediator yang bijak dan profesional semestinya mampu

meredam kemungkinan terganggunya kepentingan umum dengan kepentingan pengunjung rasa yang akan menyampaikan aspirasi.

Salah seorang informan media menyatakan sebagai berikut:

"Ada perintah Jakarta. Perasaan-perasaan yang menyatukan mahasiswa. Pesan Jakarta adalah berita harus bentrok...gak usah kirim berita kalo tidak bentrok. Ini merupakan instruksi Jakarta, dan ada perwakilan dari televisi swasta nasional yang memang menginginkan berita kekerasan/bentrok, dan kami meliputnya...dan ada memang demo yang susah diketahui sebagai pesanan Jakarta ato media ato tidak..."

Informan lain menunjukkan fenomena demo itu sebagai pesan.

Berikut pendapatnya:

"...Ada demonstrasi yang mengangkat isu nasional yang mau digolkan, dan daerah harus memberi dukungannya. Demo di depan UMI menjelang Pemilu 2004, dan demo itu yang saya tahu di *setting* oleh Pusat (maksudnya adalah Jakarta), di situ ada konsorsium pengusaha, ada alumni yang sudah menjadi elite politik, dan di situ juga sudah terlihat ada koneksi yang dibangun antara demonstran dengan elite-elite itu..."

Informan itu melanjutkan penjelasannya:

"...Jika isu lokal yang diangkat, biasanya dalam Pilkada dan pemilihan Rektor. Mahasiswa dilibatkan untuk ikut lempar-lempar batu. Mahasiswa Fisip oleh mahasiswa yang senior yang punya hubungan dengan orang-orang Rektorat, ada Rektor yang punya mahasiswa preman dan mahasiswa itu dipelihara...ini yang kemudian dikenal dengan preman-preman kampus...tetapi tidak banyak yang tahu kalo preman itu menjalankan misi universitas...mereka bereaksi berdasar pesan..."

Informan dari salah satu Perguruan Tinggi menyatakan: "Banyak demo yang diakhiri dengan kekerasan. Tidak jarang konflik pribadi dibenturkan dengan komunitas, sehingga semua orang jadi sasaran, mobil dibakar, fasilitas umum dirusak dsb." Hal itu mencerminkan bahwa sebenarnya aksi-aksi mahasiswa dapat dilihat dari tiga unsur. Unsur



*pertama, pimpinan mahasiswa yang fasih memikirkan strategis, tujuan dan ideologi gerakan. Dia harus bisa mendeskripsikan justifikasinya. Di bawah elemen pemikir, ada koordinator lapangan yang harus mampu menterjemahkan pemikiran tersebut ke dalam aksi mahasiswa. Bagaimana deskripsi sebuah gerakan mahasiswa itu untuk menelanjangi logika irasional, kebijakan pemerintah tanpa hati nurani dan tidak pro rakyat. Sementara elemen ketiga adalah massa pendukungnya.*

Ada indikasi melakukan kekerasan seperti membakar ban-ban bekas atau melakukan perusakan, dengan segera pimpinan universitas menindak dengan tegas dan kalau perlu (menskor atau memecat pelaku tindakan kekerasan). Kebijakan yang keras ini, pada mulanya menimbulkan penentangan dari berbagai kalangan kampus dan juga dari aktivis mahasiswa. Setelah itu ternyata, para demonstran mahasiswa berpikir dua kali kalau mau mengadakan demonstrasi dengan melakukan tindakan kekerasan (anarkhis). Sejak itu, demo-demo yang dilakukan para mahasiswa lebih tertib dan beradab. Karena itu diperlukan kebijakan pendidikan yang memuat aspek pembangunan keberadaban atas demonstrasi mahasiswa.

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1. Kesimpulan

Fenomena sosial kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Makassar merupakan produk tindakan-tindakan individual dan juga kolektif. Struktur sosial dan politik objektif dan representasi subjektif mahasiswa sebagai pelaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi. Artinya, keduanya tidak saling menafikan, tapi berkelindan dalam sebuah praktik kekerasan. Oleh karena itu, logika tindakan kekerasan mahasiswa memiliki dimensi rasionalitas dan irasionalitas.

Aksi-aksi mahasiswa di Makassar juga muncul akibat ketidakpuasan yang akumulatif, dan terjadi terus menerus. Kekecewaan, kemarahan yang diekspresikan dengan kegiatan demonstrasi merupakan cara mahasiswa dalam merespon kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada juga fenomena kekerasan berupa aksi-aksi tawuran sesama mahasiswa serta tindakan beringas (vandalisme) mahasiswa dengan memblokir jalan, membakar ban mobil di tengah jalan telah menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat. Kekerasan mahasiswa merupakan refleksi dari ketidakteraturan masyarakat. Ketidakteraturan itu sebagai respon terhadap perilaku represif aparat keamanan (polisi) dan juga bias disebabkan oleh kekecewaan pada system social yang ada.

Kekerasan mahasiswa sebagai akibat dari pengabaikan eksistensinya sebagai kekuatan moral dan kekuatan kontrol. Nilai-nilai moral mahasiswa telah tergerus oleh kepentingan praktis dan pragmatis. Dalam hal ini, ada nilai-nilai tertentu yang sengaja diupayakan, ditinggalkan oleh mahasiswa meski nilai-nilai itu memainkan peranan penting/pokok. Tindakan-tindakan nyata mahasiswa lebih mengacu pada nilai-nilai pragmatis jangka pendek untuk memajukan kepentingannya sendiri sebagai individu bukan sebagai

*mahasiswa. Dalam hal ini terlihat mahasiswa sudah menjauhkan dirinya sebagai kekuatan moral, justru membenamkan diri sebagai kekuatan politik yang terlepas dari kepentingan moral. Hal ini merusak tatanan keselarasan dalam kehidupan kampus dan masyarakat umumnya. Nilai-nilai ideal dan moral tidak lagi dijunjung dipegang teguh. Gerakan mahasiswa di kampus dan di luar kampus karenanya perlu dirubah saat karena sudah tidak murni gerakan mahasiswa.*

Posisi pelaku kekerasan selalu terkait dengan ruang dan konteks yang ditempati sehingga tidak lepas dari struktur yang melingkupinya. Aspek rasional dari kekerasan adalah untuk keperluan aktualisasi diri di luar bidang akademik. Sedangkan aspek irasionalitasnya adalah mereproduksi budaya kekerasan itu sendiri. Ada logika praksis yang menyebabkan berulang-ulangnya kejadian kekerasan sehingga menjadi habitus. Aspek rasionalitas dan irasionalitas merupakan satu kesatuan yang bersifat dualistis yang bergerak dalam ranah struktur dan kultur.

Untuk mengatasi kekerasan mahasiswa dibutuhkan strategi edukatif. Strategi ini fokus pada upaya untuk menghasilkan pelaku sosial yang mampu memperbaiki cara-cara dalam artikulasi aspirasi dan kepentingannya melalui pengembangan sistem pendidikan melalui penguatan kemampuan berolah nalar dalam tataran praksis maupun akademis.

**Khusus:**

Untuk mengurangi potensi kekerasan mahasiswa pada umumnya, kurikulum pendidikan harus dikelola melalui tahapan pluralitas yang disertai dengan pemberdayaan katup-katup pengamannya. Mahasiswa diajarkan tentang cara mengelola dan menghargai realitas obyektif yang beragam sehingga terbangun sikap kritis.

Pluralisme pendidikan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diimplementasikan dalam bentuk praksis akademis. Mahasiswa yang berada dalam tatanan kampus itu plural dilihat dari asal daerah, kepentingan: aktualisasi diri atau yang lainnya. Mahasiswa terkait eksistensinya merupakan bagian dari tatanan kampus (institusi pendidikan tinggi) dan

mahasiswa terikat pada aturan-aturan kampus. Kekerasan mahasiswa tidak dapat dijelaskan secara parsial karena kekerasan itu multiaspek, banyak sebab, subyektif dan obyektif, dorongan, semangat individual/bersifat personal sampai pada dorongan kolektif, obyektif, dan bersifat massif.

Bentuk-bentuk kekerasan mahasiswa bukan lagi mencerminkan gerakan moral murni. Aksi-aksi yang cenderung muncul ke permukaan dalam kegiatan akademis dengan aktivitas intelektual yang kritis melalui seminar, diskusi dan penelitian merupakan bentuk aktualisasi diri. Selain kegiatan ilmiah, kekerasan mahasiswa juga menyuarakan sikap moralnya dalam bentuk petisi, pernyataan dan suara protes. Bentuk-bentuk konservatif ini kemudian berkembang menjadi radikalisme yang dimulai dari aksi demonstrasi di dalam kampus. Secara perlahan karena perkembangan di lapangan dan keberanian mahasiswa maka aksi protes dilanjutkan dengan turun ke jalan-jalan.

## 6.2. Rekomendasi

Berdasar data, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, dapat diajukan beberapa rekomendasi secara umum. Untuk mengatasi praktik kekerasan mahasiswa di Makassar ada beberapa pilihan kebijakan yang mengarah pada status quo: terkait dengan produksi dan reproduksi kekerasan mahasiswa yang tak terbantahkan secara social karena mahasiswa berelasi secara intensif dengan kekuatan struktur (kampus, pemerintah daerah, organisasi ekstra kampus, organisasi intra kampus, dan lingkungan tempat di mana mahasiswa menjalankan kehidupan kesehariannya di masyarakat: tempat pemondokan, asrama, rumah tinggal keluarga dll).

Ada kebutuhan menyusun *rekomendasi* praktis, konseptual dan strategis dalam menelaah kekerasan dan vandalisme mahasiswa. Hal ini tak terlepas dari kebutuhan, keinginan dari setiap orang, masyarakat, dan pemerintah untuk terjaganya tatanan social kampus yang beratmosfir akademis. Kebutuhan untuk menjaga tatanan social demikian perlu didukung oleh system budaya yang berlaku. Perlu peran kesadaran manusia yang

*mampu berubah dalam sebuah perubahan social sejauh proses komunikasi dilakukan oleh pelaku-pelaku sadar diri secara terbuka dan terus menerus, dengan mempertajam dialog-dialog, mempertemukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan komunikasi aktif untuk mengambil konsensus titik-titik temu kepentingan bersama.*

Pemerintah seyogianya mengambil kebijakan yang lebih adaptif dengan kondisi mahasiswa seperti sekarang ini. Kebijakan itu bukan semata-mata mengatur, mendisiplinkan mahasiswa saja dengan menjejali kurikulum yang padat, tetapi bagaimana membangun jati diri mahasiswa di mana mahasiswa diberi ruang untuk berekspresi tidak hanya di ruang kampus tetapi di ruang public. Dengan cara ini mahasiswa dapat memiliki kesadaran kritis yang positif untuk membangun bangsa ini. Kesadaran kritis itu tidak bersifat individual dan parsial tetapi kolektif. Kesadaran kritis yang dibangun dengan memanfaatkan nilai-nilai kolektif seperti kebaikan bersama, kepentingan umum dll. Hal ini sebagai cara untuk merawat kemajemukan mahasiswa juga. Sehingga pemerintah di tingkat local maupun pusat dapat mengambil tindakan tegas dan tidak gamang terhadap kasus-kasus kerusuhan, kekerasan mahasiswa. Pemerintah tidak melakukan pembiaran atas aksi-aksi mahasiswa yang keluar dari rel kampus dan akademis. Jika kerusuhan tidak dapat ditangani dengan baik dapat menjalar pada kekerasan yang lebih ekstrim di daerah-daerah lain.

Merujuk pada Kampus menjadi arena belajar dan pendidikan. Hal ini diatur melalui Keputusan Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KeP/ 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.

Revitalisasi Aksi Mahasiswa dengan merubah orientasi aksi. Mahasiswa harus ditindak dan dikenali aksinya secara dini, ini untuk lebih mudah melakukan intervensi untuk menangani setiap aksi sehingga tidak menjadi aksi-aksi kekerasan yang merusak.

Memperkuat peran organisasi ekstra kampus karena mahasiswa menjadi kadernya. Hal ini tidak terpisah dari lokasi kekerasan yang terjadi di

*arena kampus, terutama fakultas. Organisasi ekstra kampus dapat berfungsi meminimalisasi konflik yang terjadi antar fakultas/BEM.*

Diperlukan kebijakan intervensi dari aktor fakultas (Dekan dan para pembantu Dekan) untuk membuat regulasi yang tegas tentang boleh tidaknya organisasi ekstra kampus bergerak di kampus. Bagaimanapun pekerjaan mahasiswa tidak hanya berdemonstrasi saja, tetapi, ujian-ujian, kuis, UKM, serta tugas-tugas dari dosen yang menumpuk, bahkan ada juga mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Dengan kegiatan yang sangat banyak itu, apakah relevan jika mahasiswa melakukan demonstrasi? Mereka berdemo karena memang sesuatu yang mereka demonstrasikan adalah sesuatu yang sampai titik darah penghabisan harus diperjuangkan, karena kita tidak mungkin bertahan terus menerus di bawah tekanan orde baru.

Kebijakan drop out hendaknya tidak ditetapkan secara sepihak dan berdasar pada pertimbangan atau indikator akademis (Ukuran indeks akademik kumulatif/IP, masa studi, dll). Hal ini dapat meningkatkan rasa kecewa mahasiswa dan berdampak pada aksi-aksi mahasiswa berikutnya. Pemerintah seyogianya membuat regulasi kebijakan atas mahasiswa bermasalah akademik. Bagaimanapun peraturan tentang drop out selama ini berkaitan dengan kekerasan yang bersifat struktural.

### **Membangun Karakter Mahasiswa**

Selama ini mahasiswa masuk dalam tatanan kerangkeng besi (kurikulum pendidikan) dan situasi kekakuan serta keterasingan hubungannya dengan dosen. Yang terjadi adalah mahasiswa menjadi objek akademis dari dosen. Dosen memberi tugas sebanyak-banyaknya tanpa memberikan umpan balik atau mengoreksi dan mengembalikan pekerjaan itu kepada mahasiswa. Mahasiswa harus dibangun karakternya secara akademis, dan moralistik. Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas atau memenuhi tugas yang diwajibkan oleh dosen tidak serta merta diberikan sanksi. Mahasiswa perlu ditelusur alasannya atas tugas yang tidak dikerjakannya itu. Ada proses dialog dan mahasiswa diberi kebijakan kompensasi yang bisa

*menggiatkan daya nalar mahasiswa dengan cara yang lain. Contoh: dengan memberi tugas lain atau membuat paper, mereview dll. Dengan cara itu pelaksanaan Kurikulum Berbasis Karakter (KBKt) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBKp) dapat dijalankan.*

*Di samping itu, mahasiswa juga selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan akedemis non kuliah, seperti diskusi, workshop, seminar dll. Ini sebagai upaya membangun atmosfir akademik perlu dibangun, dikembangkan sehingga lingkungan kampus tidak menjadi lingkungan akademik yang membosankan, terstruktur, dan kaku. Kecenderungan yang ada selama ini, kampus tidak ada atmosfir akademik. Mahasiswa berorientasi praktis pada kelulusan sebagai sarjana, cepat lulus adalah semakin baik.*

*Oleh karena itu, pemerintah perlu membaca kecenderungan seperti ini. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk merevitalisasi kekuatan moral mahasiswa yang sudah digerogeti oleh kepentingan sesaat dan politis. Meski banyak pihak meragukan karakter, mental, dan moral dapat diajarkan dan diatasi dalam mata kuliah. Kalaupun ada KBKt dan KBKp, mereka hendaknya dimulai dan diikuti dengan pendekatan yang manusiawi dan beradab.*

*Masyarakat hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang diusung oleh mahasiswa. Masyarakat hendaknya lebih dewasa dalam bersikap dan bertindak. Karena aksi-aksi terbuka yang berlangsung di area publik selama ini mudah diprovokasi oleh masyarakat untuk tujuan lain. Masyarakat juga sering menjadi pembonceng aksi-aksi unjuk rasa bahkan berbaur sehingga aksi kekerasan pun tumpah ruah di jalan.*

*Aksi-aksi nyata yang dilakukan mahasiswa dengan perusakan fasilitas publik termasuk tindakan yang merugikan masyarakat seperti pembakaran ban bekas dll seyogianya tidak didekati dengan pendekatan keamanan, dengan melibatkan aparat polisi untuk mengatasinya. Kecenderungan ini terbukti semakin memperkeras terjadinya aksi kekerasan sebagai bentuk perlawanan mahasiswa. Tindakan tersebut tidak menjamin proses kekerasan pada gelombang berikutnya dapat diselesai tuntas. Untuk*

itu, *intervensi dalam membongkar akar-akar kekerasan pada dimensi kedua dan ketiga sangat diperlukan dan dilakukan secara bersamaan.*

Pengelolaan semua potensi mahasiswa merupakan kebijakan alternatif yang bisa diterapkan untuk memutus jaring kekerasan mahasiswa. Pengelolaan potensi itu bisa ditempuh dengan perbaikan metode belajar mengajar yang bersifat dialogis, tidak mengutamakan pendekatan yang bersifat teknis dan kaku. Untuk mencapai hal ini diperlukan perubahan dalam kebijakan perguruan tinggi. Seluruh civitas akademika tidak melakukan interpretasi secara tunggal kekerasan itu, tetapi menafsirkannya secara multiaspek. Karena kekerasan adalah bukan kekerasan itu sendiri. Kekerasan lebih merupakan manifestasi dari kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh pengakuan atas jati diri sebagai mahasiswa yang kritis.

Suara dan kepentingan mahasiswa bukan suara dan kepentingan mahasiswa sendiri, melainkan suara masyarakat juga. Ini suatu indikasi bahwa mahasiswa berjuang untuk kepentingan masyarakat juga. Habitus yang mendukung dan mengkonstruksi mahasiswa melakukan kekerasan. Mahasiswa cenderung melakukan perlawanan dan berorientasi pada perubahan-perubahan struktural (demonstrasi yang mengusung isu-isu nasional, seperti UU BHP, UU bidang politik, dll).

#### **Khusus:**

- **Bagi Pemerintah Lokal**

Pemerintah Daerah seyogianya tidak bersikap acuh demonstrasi mahasiswa. Mahasiswa masih akan terus mengartikan kekerasan sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengubah persepsi pemerintah yang keliru dalam menginterpretasi kekuatan mahasiswa. Mahasiswa eksistensinya tidak dapat dinafikkan karena mereka masih menjalankan peran untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan rakyat.

- **Bagi Pemerintah Pusat**

Kekerasan dan vandalisme mahasiswa bukan problem lokal, tetapi juga nasional. Pemerintah pusat dalam hal ini DIKTI memiliki otoritas untuk



melakukan re-regulasi dan melakukan de-mistifikasi terhadap budaya kekerasan mahasiswa itu yang cenderung direproduksi dan diwariskan dari generasi ke generasi.

- **Bagi Universitas**

Perlu adanya pemberadaban demonstrasi mahasiswa melalui perbaikan kurikulum maupun penataan struktur organisasi intra mahasiswa. Universitas perlu meninjau kembali kebebasan mahasiswa dalam berunjuk rasa. Setidaknya perlu ada kerangka kebijakan yang mengawal aksi-aksi mahasiswa untuk tidak sampai pada kekerasan dan vandalisme. Pihak kampus juga harus tegas menerapkan sanksi kepada pelaku kekerasan, mulai dari sanksi lunak skorsing tidak boleh mengikuti kegiatan akademik selama satu semester, hingga pada pemecatan mahasiswa.

Kampus juga perlu mengembangkan kecerdasan emosi dan soft skill mahasiswa menjadi program berkesinambungan untuk meredam tawuran. Kegiatan-kegiatan yang bersifat soft skill dan bisa memperbaiki karakter mahasiswa.

### **Bagi Mahasiswa**

Mahasiswa dari karakteristiknya adalah sebuah kekuatan moral bukan kekuatan politik dan menempuh cara-cara politik praktis untuk mencapai kepentingannya. Bagaimanapun mahasiswa tidak seperti organisasi sosial politik yang memiliki kepentingan praktis dan politis. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lain gerakan massa turun ke jalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka.

Mahasiswa adalah bagian dari kehidupan masyarakat, keberpihakan mahasiswa pada kepentingan masyarakat seyogianya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan mengganggu kepentingan umum. Basis tindakan mahasiswa adalah nilai-nilai etis/moral dan nalar, dan ini harus menjadi acuan dalam setiap tindak tanduknya. Mahasiswa memiliki kebutuhan

*untuk aktualisasi diri, dan hal ini dapat diwujudkan dalam peran sosialnya melalui pemikiran dan kepemimpinannya dalam kegiatan yang ada di masyarakat.*

- **Bagi Aparat Keamanan**

Untuk menurunkan tensi ricuh antara polisi-mahasiswa di Makassar, semua pihak harus introspeksi diri. Mahasiswa selaku calon intelektual seharusnya mengapresiasi aturan hukum dan menghargai hak-hak orang lain dalam menggunakan ruang publik. Misalnya, tidak menutup jalan secara serampangan, merusak fasilitas umum, sampai bentrokan dengan aparat kepolisian. Pengalaman buruk selama tiga hari itu, seyogianya dijadikan momentum bahwa aspirasi yang menggunakan ruang publik butuh tenggang rasa agar aspirasi yang disampaikan mendapat simpati rakyat. Ricuh antara polisi dan mahasiswa itu harus menuju akhir yang tidak saling menyakiti. Polisi harus mampu menahan diri dan bersikap persuasif, bersahabat, dan berpenampilan sipil saat berhadapan dengan mahasiswa. Polisi perlu belajar pada pengalaman empiris yang banyak membuktikan bahwa aksi unjuk rasa bukan saja dapat memengaruhi kebijakan, melainkan juga bisa menjatuhkan pejabat polisi yang dianggap tidak mampu menetralisasi keinginan rakyat (mahasiswa) saat berunjuk rasa.

- **Bagi Masyarakat**

Masyarakat hendaknya tidak mendukung kekerasan mahasiswa dengan memberi bantuan dalam bentuk apapun, terutama konsumsi maupun terlibat dalam kekerasan. Kekerasan bukan tontonan politik, karena itu masyarakat tidak perlu memanfaatkan arena kekerasan yang dilakukan mahasiswa di jalan untuk ekspresi kekecewaannya terhadap pemerintah. Diperlukan kematangan dan kedewasaan mahasiswa dan masyarakat dalam mengartikan kekerasan dalam berbagai bentuk fisiknya supaya tidak disalahgunakan dan dimaknai salah untuk tujuan politik praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arent, Hannah. (1969). *On Violence*. Harvest Books New York: Harcourt, Brace and World.
- Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeeddin. (2004) "Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990-2003, Working paper series (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery).
- Bourdieu, Pierre. (1990). *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge, Polity Press
- Bryman, Alan. (2004). *Social Research Methods*, New York, Oxford Univ.Press
- Collins, Randall. (1975). *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*, New York, Academic Press
- Coser, Lewis A. (1967). *Continuities in the Study of Social Conflict*, New York, Free Press
- Creswell, John W, (2002). "Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (*Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*)", terj: Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerja sama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar: Parsudi Suparlan, Jakarta, KIK Press
- Eller, David. (2006). *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach*. Thomson and Wadsworth
- Fisher, Simon, Dekha Ibrahim Abdi et.al (2000). *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, London, Zed Books Ltd.
- Fransisco, Ronald A. (2010). *Collective Action Theory and Empirical Evidence*, USA, Springer
- Giddens, Anthony.(1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Oxford, Cambridge Polity
- Gurr, Ted Robert. (1970). *Why Men Rebel*, New Jersey, Princeton Univ.Press
- \_\_\_\_\_.1970. Relative Deprivation and the Impetus to Violence, dalam *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton Univ.Press
- Keane, John. (2004) *Violence and Democracy*. Cambridge University Press.
- Laclau, E. (1991). "Community and Its Paradoxes: Richard Rorty's "Liberal Utopia", M. T. Collective. *Community at Loose Ends*. Minneapolis, University of Minnesota Press
- McAdam, Doug, McCarthy, John D and Zald, Mayer N. (eds.) (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements*, Cambridge, Cambridge Univ.Press.
- Newman, W.Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, USA, Pearson Education Inc.
- Porta, Donatella Della dan Mario Diani (2006). *Social Movement: An Introduction*, USA, Blackwell Pub
- Ritzer, George dan Doouglas Goodman, (2003). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana

- Robnett, Belinda. (2002). *External Political Change, Collective Identities and Participation in Social Movement Organizations*, dalam Meyer, David S., Nancy Whittier & Belinda Robnett (eds), 2002. *Social Movements Identity, Culture, and the State*. Oxford: Oxford University Press, Inc.
- Schmidt and Schroder (2001). *Anthropology of Violence and Conflict*. Routledge
- Swartz, David. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*, Chicago & London: The University of Chicago Press
- Tilly, Charles. (2004). *Social Movements 1768-2004*, London, Paradigm Publishers
- Touraine, Alain. (1988). *Do the Social Movement Exist?* Congresso Internacional da ISA, Montreal, Canada
- \_\_\_\_\_. (1981), *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*, Cambridge, Cambridge University Press

### Daftar Referensi Online

[http://www.ata.boun.edu.tr/scanneddocuments/Course\\_Material/ATA\\_582/5%20castells.pdf?name=Course\\_Material-ATA\\_582-first%20week-charles%20tilly.pdf](http://www.ata.boun.edu.tr/scanneddocuments/Course_Material/ATA_582/5%20castells.pdf?name=Course_Material-ATA_582-first%20week-charles%20tilly.pdf). Ma-nuel Castells, *Materials for an exploratory theory of the network society*, diunduh 5 Maret 2007